

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

(Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat

Jawa Timur IV)



TESIS

Diajukan Oleh

Rizal Giri Laksono

19919017

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat
Jawa Timur IV)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Magister Strata-2 Program Studi Magister Akuntansi pada
Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia



Oleh:

Nama: Rizal Giri Laksono

No. Mahasiswa: 19919017

**Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Bisnis Dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 05 Juli 2023

Penulis,



(Rizal Giri Laksono)

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 682/Ka.Div/10/Div.PP/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Rizal Giri Laksono**
Nomor Mahasiswa : **19919017**
Dosen Pembimbing : **Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFA**
Program Studi : **Magister Akuntansi**
Judul Karya Ilmiah : **Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV)**
Nomor Hp : **082133960340**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **16% (enam belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 5 Juli 2023

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan



Bambang Hermawan, S.Si.
Chh

LEMBAR PENGESAHAN

**Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat
Jawa Timur IV)**

TESIS



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 22 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CfrA

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', is written over the printed name below.

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR / TESIS

Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

RIZAL GIRI LAKSONO

No. Mhs. : 19919017

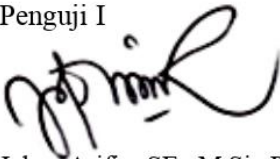
Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PEMERIKSAAN SUB AUDITORAT JAWA TIMUR IV)

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji II



Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Pada hari Selasa, 18 Juli 2023 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **RIZAL GIRI LAKSONO**
No. Mahasiswa : 19919017
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Audit Forensik
Dosen Pembimbing : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.
Judul Tugas Akhir :

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PEMERIKSAAN SUB AUDITORAT JAWA TIMUR IV)

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan :

	Lulus Tanpa Revisi
V	Lulus Dengan Revisi
	Tidak Lulus (Wajib Mengulang)
Dengan Nilai : A	

Penguji I : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.
Penguji II : Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Agus Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.

Catatan:

Tugas akhir yang dinyatakan Lulus dengan Revisi, maka waktu revisi maksimum selama 2 (dua) minggu sejak diterimanya Berita Acara ini. Apabila tidak selesai, maka kelulusan dan tugas akhir tersebut dinyatakan gugur.

MOTTO

“The difference between who you are and who you want to be is what you do”

(Unknown)

Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah.

Jika tak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya.

(Maya Angelou)



KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV).” Tesis ini disusun sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar magister Strata-2 Program Studi Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Selama penyusunan skripsi ini saya telah mendapatkan doa, bantuan, bimbingan, dukungan, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi doa, bantuan, bimbingan, dukungan, dan nasihat demi terselesainya skripsi ini.

1. Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya (Bapak Saimun, S.IP. dan Ibu Murnining Ediasih, S.Pd., SD.) serta adik saya Farhan Gilang Irawan terima kasih atas doa, dukungan, dan nasihat selama ini.
3. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFrA selaku dosen pembimbing Tesis. Terima kasih banyak atas bimbingan bapak, bapak selalu meluangkan waktu walau sesibuk apapun. Terima kasih atas ilmu, nasihat, saran, dan pengarahan bapak selama proses bimbingan.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D., selaku Kepala Program Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Semua Dosen Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan masukan yang berarti sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang.
8. Semua Karyawan dan Tata Usaha Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran studi saya selama ini.
9. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan surat rekomendasi/surat izin untuk penelitian ini.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan surat rekomendasi/surat izin untuk penelitian ini.
11. Seluruh Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
12. Semua pihak pegawai/karyawan pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
13. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Saya menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 22 Juni 2023

Penulis,

Rizal Giri Laksono

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Keterangan Hasil Uji Plagiarisme	iv
Halaman Lembar Pengesahan.....	v
Halaman Berita Acara Ujian Tugas Akhir / Tesis	vi
Motto.....	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xvii
Daftar Gambar.....	xviii
Daftar Lampiran	xix
Abstrak	xx
BAB I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Akademis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
1.4.2.1 Manfaat Bagi Instansi.....	11
1.4.2.2 Manfaat Bagi Pembaca	12

1.4.2.3 Manfaat Bagi Peneliti.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : Kajian Pustaka.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Institusional (<i>Institutional Theory</i>).....	14
2.1.2 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	17
2.1.3 Teori Manajemen Publik Baru (<i>New Public Management Theory</i>).....	19
2.2 Variabel Penelitian.....	21
2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
2.2.2 Akuntabilitas.....	23
2.2.3 Komitmen Organisasi.....	24
2.2.4 Kompetensi SDM.....	25
2.2.5 Tekanan Eksternal.....	26
2.2.6 Transparansi.....	27
2.3 Penelitian Terdahulu.....	28
2.4 Kerangka Penelitian.....	37
2.5 Hipotesis Penelitian.....	38
2.5.1 Pengaruh antara akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	38
2.5.2 Pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	40
2.5.3 Pengaruh antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	43

2.5.4 Pengaruh antara tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	45
2.5.5 Pengaruh antara transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	48
BAB III : Metodologi Penelitian.....	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Populasi dan Sampel.....	50
3.3 Sumber Data, Instrumen Data, dan Metode Pengumpulan Data.....	51
3.4 Definisi Operasional Variabel	53
3.4.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)	53
3.4.2 Variabel Bebas (Variabel Independen).....	54
3.4.2.1 Akuntabilitas	54
3.4.2.2 Komitmen Organisasi.....	55
3.4.2.3 Kompetensi SDM	55
3.4.2.4 Tekanan Eksternal	56
3.4.2.5 Transparansi	56
3.5 Metode Analisis Data	57
3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	57
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	58
3.5.2.1 Uji Normalitas	58
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	59
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	59
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda	60

3.5.4 Analisis Koefisien Determinasi	61
3.5.5 Uji Parsial (Uji t)	62
BAB IV : Hasil Analisis Data dan Pembahasan	63
4.1 Hasil Pengumpulan Data	63
4.1.1 Persebaran Kuesioner	63
4.1.2 Analisis Data Responden.....	64
4.1.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
4.1.2.2 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	65
4.1.2.3 Responden Berdasarkan Usia	66
4.1.2.4 Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja (Masa Kerja).....	67
4.2 Statistik Deskriptif Data	67
4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	69
4.3.1 Hasil Uji Validitas	69
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas	71
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	72
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	72
4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	75
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	78
4.6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi.....	81
4.7 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	82
4.8 Pembahasan	84

4.8.1 Pengaruh antara akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	84
4.8.2 Pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	87
4.8.3 Pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	90
4.8.4 Pengaruh antara tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	93
4.8.5 Pengaruh antara transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	95
BAB V : Simpulan Dan Saran	98
5.1 Simpulan.....	98
5.2 Saran	100
Daftar Pustaka	102
Lampiran	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV..	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 4.1 Data Persebaran Kuesioner	64
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	65
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Usia.....	66
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja (Masa Kerja)	67
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Data.....	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	70
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov.....	73
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	75
Tabel 4.11 Hasil Uji Glejser.....	78
Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	79
Tabel 4.13 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	81
Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	37
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	73
Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan P-P Plot	74
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot	77



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Izin Penelitian	112
LAMPIRAN 2 : Kuesioner Penelitian	119
LAMPIRAN 3 : Tabulasi Data	127
LAMPIRAN 4 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	152
LAMPIRAN 5 : Hasil Uji Asumsi Klasik.....	159
LAMPIRAN 6 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	162



ABSTRACT

This research aimed to provide empirical evidence and analyze the effect of accountability, organizational commitment, human resources, external pressure, and transparency on the quality of local government financial reports. This research is quantitative descriptive. This study applied a survey method using a questionnaire which was distributed to all heads or staff or employees in the Finance Section of the Regional Work Unit (SKPD) of the Regency/City Government in the East Java IV Sub-auditorate Examination Area. The sampling technique is based on considerations of convenience (purposive sampling). The statistical tool for testing the hypothesis is multiple linear regression analysis using the IBM SPSS Statistics 25 software. The results of hypothesis testing indicate accountability and external pressures have a positive and significant effect on the quality of local government financial reports. Meanwhile, organizational communication, human resource modules, and transparency do not significantly affect the quality of local government financial reports.

Keywords: accountability, organizational commitment, human resource competence, quality of local government financial reports, external pressure, and transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, tekanan eksternal, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menerapkan metode survei menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh kepala atau staf atau pegawai di bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV. Teknik pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan kemudahan (purposive sampling). Alat statistik untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi Linear berganda dengan alat bantu software IBM SPSS Statistics 25. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas dan tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: akuntabilitas, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tekanan eksternal, dan transparansi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mulai berlaku sejak tahun 1999 pada masa pemerintahan Habibie dengan sistem desentralisasi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan baru mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya good government governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi yang diharapkan mencapai good government governance (Budiawan dan Purnomo, 2014). Salah satu perwujudan dari good governance adalah seperangkat peraturan maupun tata kelola pemerintah yang mengatur mengenai fungsi, hubungan, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan secara baik dan bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Lubis (2017), sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa tercermin dalam aspek keuangan. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan masalah dalam penerapan prinsip good governance karena posisi strategis pembangunan bangsa berasal dari aspek keuangan negara. Pemerintah Daerah berupaya untuk menerapkan prinsip good governance dengan membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Menurut Pujanira dan Taman (2017), laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak terdapat penyimpangan, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas muncul karena adanya kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat, sekaligus merefleksikan kehidupan demokrasi berbangsa dan bernegara. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud apabila laporan keuangan pemerintah daerah telah menyajikan informasi yang sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Surastiani dan Handayani (2015), kelemahan

administrasi, kekurangan penerimaan, tidak hemat, tidak efisien, tidak efektif, dan potensi kerugian daerah dapat terjadi apabila pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selaku auditor eksternal. BPK RI merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di dalamnya terdapat opini auditor, hasil temuan, dan rekomendasi tindak lanjut yang semestinya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan sistem keuangan (Christian dan Sutaryo, 2015). Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan strata tertinggi, kemudian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tingkatan selanjutnya, Tidak Wajar (TW), dan opini pada tingkatan terakhir adalah Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV Tahun 2020 pada sembilan entitas pemerintah daerah kabupaten/kota, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk delapan entitas pemeriksaan yaitu enam pemerintah daerah kabupaten dan dua pemerintah kota dan satu opini Tidak Wajar (TW). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Sedangkan opini Tidak Wajar (TW) diberikan kepada Kabupaten Jember. Berikut tabel Opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV:

Tabel 1.1

Opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV

No	Entitas	Opini LKPD								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Banyuwangi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bondowoso	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Jember	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP	TMP	TW
4	Kab. Lumajang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Pasuruan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Probolinggo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Situbondo	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kota Pasuruan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
9	Kota Probolinggo	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: <https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-pemerintahdaerah/>

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Budiawan dan Purnomo (2014) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang lemah umumnya terjadi karena pejabat/ pelaksana belum melakukan pencatatan akuntansi secara

akurat, tidak menaati ketentuan dan/atau prosedur yang ada, belum adanya kebijakan akuntansi yang jelas, dan pengawasan serta pengendalian yang lemah. Menurut BPK kelemahan SPI disebabkan karena pengendalian belum optimal, ketentuan yang belum sesuai, dan kesalahan penganggaran yang tidak akurat. Sedangkan ketidakpatuhan mungkin terjadi karena pemerintah daerah berusaha untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi, sehingga hanya menekankan aspek-aspek positif agar terlihat baik oleh pihak-pihak di luar organisasi (Budiawan dan Purnomo, 2014). Sedangkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diberikan oleh BPK dikarenakan laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, adanya kecukupan pengungkapan yang dilakukan pemerintah, adanya kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada, dan adanya sistem pengendalian internal. Mardiasmo (2018) menambahkan laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan harus memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah memberikan informasi kepada stakeholder dan digunakan untuk pengambilan keputusan (Hafsari, 2020). Sehingga laporan keuangan tidak boleh berisi informasi yang menyesatkan karena apabila menyesatkan akan mengakibatkan kesalahan dalam mengambil suatu keputusan (Nugroho, 2018). Informasi akuntansi menurut Winarni dan Akbar (2020) merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengomunikasikan informasi ekonomi yang memungkinkan pengguna informasi membuat keputusan yang tepat. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan

dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Sebuah informasi akuntansi akan bermanfaat apabila informasi tersebut telah memenuhi karakteristik kualitatif (qualitative characteristics) (Chodijah dan Hidayah, 2018).

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan telah dijalankan oleh Kepala Daerah. Akuntabilitas laporan keuangan tercermin pada kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atas laporan keuangan yang telah dibuat (Setyowati et al., 2016). Kualitas laporan keuangan menurut Yuliani et al. (2010) haruslah menyajikan laporan keuangan yang memiliki kriteria berupa kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang dibuat dapat selesai tepat waktu (Pujanira dan Taman, 2017). Menurut Winarni dan Akbar (2020) ada beberapa faktor seperti tekanan eksternal dan internal institusional yang memengaruhi kualitas informasi akuntansi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Winarni dan Akbar (2020) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas informasi akuntansi pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya bukti yang kuat mengenai pengaruh tekanan eksternal dan internal institusional terhadap kualitas informasi akuntansi pada laporan keuangan

pemerintah daerah. Penelitian dari Winarni dan Akbar (2020) tidak sejalan dengan penelitian dari Lubis (2017) yang membuktikan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menambahkan variabel akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan saran penelitian dari Winarni dan Akbar (2020). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan hingga kini masih menjadi masalah (problem) bagi daerah. Budaya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dapat terjadi apabila akuntabilitas dan transparansi keuangan tidak berjalan dengan baik. Menurut Akbar et. al. (2015), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dibuat oleh pemerintah daerah belum memberikan kepuasan dan keyakinan kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat diatasi apabila pemerintah daerah membudayakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Hamsinar (2017) menjelaskan lebih lanjut mengenai transparansi dan keterbukaan dapat menciptakan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi transparansi bukan hanya memberikan informasi kepada masyarakat, transparansi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah khususnya pelayanan publik (Septiani, 2020). Transparansi kebijakan publik bersifat terbuka bagi masyarakat dari mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka dan mudah (Sofyani dan Akbar, 2013).

Penelitian ini menggunakan teori institusional (Institutional Theory) sebagai teori utama, selain itu terdapat juga Teori Keagenan dan New Public Management sebagai teori pendukung. Teori institusional harus mengadopsi perspektif internal untuk memahami dengan tepat bagaimana sistem dan makna kelembagaan harus dipahami dan ditafsirkan dalam organisasi (Suddaby, 2010). Dengan demikian, regulator dan stakeholder dapat memberikan tekanan berupa perubahan positif, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan komitmen manajemen yang berasal dari internal institusional dalam usaha meningkatkan kualitas informasi akuntansi (Winarni dan Akbar, 2020).

Salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi adalah sumber daya manusia yang merupakan faktor penentu dalam perkembangan informasi akuntansi sehingga kualitas profesional sumber daya manusia harus ditingkatkan (Marsdenia dan Arthaingan, 2016). Kondisi sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah saat ini ternyata tidak memberi perubahan besar dalam peningkatan kinerja kendatipun sumber daya memiliki keahlian dan ditunjang dengan teknologi yang cukup memadai. Menurut Mutiana et. al. (2017) sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah dalam bertugas tidak memiliki etos kerja yang berorientasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga tidak memberi perubahan besar dalam peningkatan kinerja. Kompetensi SDM diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Kompetensi didefinisikan sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, bisa diukur

dengan menggunakan standar yang telah disepakati, dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan (Marwansyah, 2016).

Tekanan eksternal seperti peraturan dari organisasi induk (pemerintah), regulasi (peraturan atau undang-undang), maupun stakeholder merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan (Nurdin et al., 2012). Tekanan eksternal berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar organisasi atau pemerintahan yang sedang berjalan. Salah satu contoh adanya regulasi atau peraturan yang secara eksplisit atau formal diberlakukan untuk menyusun struktur institusi pemerintah agar berperilaku dengan cara tertentu. Stakeholder memiliki peran penting yaitu memastikan proses akuntansi, pelaporan relevan, dan mencerminkan isu utama, aspirasi dan kepentingan (Olesson et al., 2012).

Teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan (2016) menjelaskan mengenai dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan terjadi apabila terdapat kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberikan kewenangan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Harahap, 2012). Hubungan keagenan dapat digambarkan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah. Masyarakat selaku agen mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah selaku prinsipal berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang dibuatnya kepada masyarakat (Hamsinar, 2017).

New Public Management (NPM) menurut Mardiasmo, (2018) merupakan sebuah konsep perubahan manajemen sektor publik yang awalnya terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi fleksibel dan dapat mengakomodasi pasar. Manajemen dalam menjalankan komitmen organisasi harus dapat mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan agar organisasi dapat sukses dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah kesiapan dan koordinasi seluruh pegawai untuk melaksanakan peran serta kewenangan masing-masing serta komitmen yang kuat oleh seluruh pihak dalam suatu organisasi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Jika komitmen organisasi telah terbangun, maka akan mendukung tercapainya tujuan (Irfani et al., 2020). Penerapan New Public Management merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Bagaimana pengaruh tekanan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, tekanan eksternal, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan dan/atau sektor publik terutama masalah mengenai akuntabilitas, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, tekanan eksternal, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Manfaat Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan pemerintah mengenai akuntabilitas, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, tekanan

eksternal, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga tercapainya good government governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4.2.2 Manfaat Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu dapat menambah wawasan/ pengetahuan mengenai aspek-aspek yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian secara mendalam, khususnya pada permasalahan serupa.

1.4.2.3 Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu peneliti dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya bidang pemerintahan dan/atau sektor publik yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat. Selain itu, peneliti dapat menambah dan mengembangkan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara membandingkan teori dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori dalam analisis penelitian ini (variabel dependen (Y), penelitian terdahulu, landasan teori, variabel independen (X), pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian dilakukan mulai dari menentukan populasi dan sampel, sumber data, instrumen data, dan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil pengumpulan data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, analisis koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Institusional (Institutional Theory)

Teori institusional (Institutional Theory) atau teori kelembagaan terbentuk karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi dalam organisasi atau lembaga (Fitrianto, 2015; Khubiyati dan Arifin, 2016; Goddard et al., 2016). Teori institusional menurut Midin et al. (2016) merupakan peristiwa di mana lingkungan kelembagaan dapat memengaruhi perkembangan struktur formal dalam sebuah organisasi. Perspektif teori kelembagaan menggambarkan struktur organisasi menerima sesuatu yang sesuai dengan kode etik budaya, yang kemudian mengarah pada legitimasi dan dukungan dari organisasi eksternal (DiMaggio dan Powell, 1983; Ahyaruddin dan Akbar, 2017; Surachman dan Astuti, 2020). Ridha dan Basuki (2012) menyatakan bahwa ide atau gagasan menghasilkan bahasa dan simbol yang menjelaskan keberadaan suatu organisasi dan diterima (taken for granted) sebagai norma dalam konsep organisasi.

Lingkungan kelembagaan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam proses institusionalisasi karena organisasi memiliki ketergantungan yang tinggi dengan lingkungan kelembagaannya sehingga melahirkan aturan, nilai, dan praktik baru yang menjadi bagian dari organisasi (Mariandini et al., 2018). Teori institusional berkaitan dengan bagaimana organisasi menyusun diri mereka sendiri dan mendapatkan penerimaan dan legitimasi yang mungkin mengorbankan

efisiensi. Organisasi bukan hanya berkompetisi untuk memperoleh sumber daya dan customer tetapi juga mendapatkan kekuatan politik, legitimasi institusi, dan untuk kepentingan sosial (Kisworo dan Shauki, 2019). Legitimasi adalah penerimaan suatu organisasi oleh aktor sosial tertentu dalam masyarakat, karena tidak semua pihak memiliki kedudukan untuk memberikan legitimasi (Arifin, 2014). Organisasi dibentuk oleh berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sehingga kecenderungannya menjadi mirip (isomorfik) dengan lingkungan (Savitri dan Fanani, 2017). Hal ini disebabkan oleh saling ketergantungan dalam hal teknis dan pertukaran, atau memang karena struktural, organisasi mencerminkan realitas yang dibangun secara sosial (DiMaggio dan Powell, 1983).

Salah satu prinsip utama dari teori institusional adalah isomorfisme yang mengacu pada kecenderungan organisasi di bidang yang sama untuk mengadopsi bentuk dan prosedur yang sama untuk mendapatkan legitimasi (Goddard et al., 2016). Hal ini mengakibatkan organisasi menjadi sasaran tekanan isomorfik untuk mengadopsi bentuk seperti itu. DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme untuk perubahan institusional isomorfik yaitu koersif (coercive), mimetik (mimetic), dan normatif (normative). Isomorfisme bersifat koersif (coercive), ketika suatu organisasi mengadopsi norma-norma tertentu karena tekanan yang diberikan oleh organisasi lain dan oleh masyarakat pada umumnya; mimetik (mimetic) atau meniru ketika organisasi dengan sengaja meniru; dan menyalin satu sama lain sebagai respons terhadap ketidakpastian atau isomorfisme normatif (normative) terjadi ketika organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi.

Sofyani dan Akbar (2015) menyatakan isomorfisme koersif merupakan hasil dari tekanan formal maupun informal. Kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem. Tekanan eksternal dikategorikan ke dalam isomorfisme koersif menurut DiMaggio dan Powell (1983) karena kebijakan tertentu diadopsi oleh tekanan atau kekuatan yang memaksa. Pengaruh tekanan eksternal seperti regulasi maupun stakeholder ke arah yang positif dapat mendorong kualitas informasi akuntansi (Nalukenge et al., 2012).

Institusionalisasi akuntabilitas keuangan menunjukkan indikasi adanya isomorfisme. Pada penelitian ini, isomorfisme koersif merupakan pendorong utama yang terjadi karena adanya desakan formal yang memaksa Pemerintah Daerah untuk mematuhi dan mengimplementasikan Peraturan atau Undang-Undang untuk dapat meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, akuntabilitas juga termasuk ke dalam isomorfisme normatif (normative) karena dalam proses pertanggungjawaban keuangan organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi. Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan atau undang-undang.

DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa isomorfisme normatif (normative) terjadi ketika organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi. Nilai dan prinsip suatu organisasi tercipta dari suatu proses institusionalisasi karakter yang ditentukan dari komitmen organisasi dan sumber daya manusia yang merupakan bagian dari

internal institusional. Komitmen organisasi terwujud dalam artian profesionalisme organisasi baik mematuhi, menjalankan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan dan hukum di organisasi. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam penilaian profesionalisme. Sumber daya manusia menurut Zhou (2010) merupakan faktor penentu dalam perkembangan informasi akuntansi sehingga kualitas profesional sumber daya manusia harus ditingkatkan. Selain itu, nilai dan prinsip kepatuhan merupakan suatu hal yang harus dipegang dan dilakukan dalam mengelola keuangan organisasi secara profesional (Putra, 2016). Kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan merupakan dasar pembangunan transparansi yang menghasilkan nilai dan prinsip kepatuhan. Transparansi menurut Hamsinar (2017) adalah keterbukaan yang dapat menciptakan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan (2016) menjelaskan mengenai dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan terjadi apabila terdapat kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberikan kewenangan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Harahap, 2012). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Pertentangan terjadi apabila agen tidak

menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri. Ideologi organisasi pada sektor publik/ pemerintahan lebih mengedepankan kepentingan publik atau memaksimalkan kepentingan sosial. Sementara pada teori keagenan terdapat unsur kapitalisme yang melekat di mana paradigma yang terjadi menempatkan self-interest (kepentingan sendiri) sebagai sesuatu yang lebih dominan (Winarti dan Suardana, 2018).

Pola pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sejalan dengan teori keagenan (agency theory) yang menciptakan hubungan keagenan di mana Pemerintah Daerah bertindak sebagai agen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak sebagai wakil dari prinsipal (Redjo, 2018). DPRD tidak memiliki informasi secara penuh mengenai laporan pertanggungjawaban eksekutif atas pengelolaan anggaran. Hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah pertanggungjawaban pengelolaan anggaran telah mencerminkan kondisi sesungguhnya (laporan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sistem pengendalian internal telah diterapkan, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut telah diungkapkan secara penuh). Akuntabilitas merupakan suatu hal yang dapat dipertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat atau individu atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas untuk memperoleh tujuan yang ditetapkan (Hamsinar, 2017). Iyoha dan Oyerinde (2010) mengatakan bahwa akuntabilitas mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan terkait dengan sumber dan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya publik.

2.1.3 Teori Manajemen Publik Baru (New Public Management Theory)

Teori new public management merupakan teori manajemen publik yang menganggap manajemen sektor swasta lebih baik daripada manajemen sektor publik (Mahmudi, 2019). Tujuan new public management menurut Mahmudi (2019) adalah melakukan reinventing government, restrukturisasi, dan pembaruan sistem birokrasi untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik, meningkatkan daya respon lembaga publik, mengurangi pengeluaran publik, dan memperbaiki akuntabilitas manajerial (Sambuaga, 2020). New Public Management (NPM) menurut Denhardt dalam Lynda (2019) adalah sistem manajemen terpusat dengan unsur manajemen baru seperti pengendalian (controlling), perbandingan (benchmarking), dan perampingan manajemen (lean management). New Public Management (NPM) menurut Mardiasmo, (2018) merupakan sebuah konsep perubahan manajemen sektor publik yang awalnya terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi fleksibel dan dapat mengakomodasi pasar. New Public Management (NPM) dapat dipahami sebagai kegiatan pemerintah untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen pada birokrasi yang modern supaya dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja, dan pelayanan publik (Lynda, 2019).

Penerapan New Public Management merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui rekrutmen pegawai berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis akuntansi (Irfani et al., 2020). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku seorang Pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Seiring dengan perubahan yang terjadi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya kinerja pelaksanaan pemerintahan (Mutiana et. al., 2017). Sumber daya manusia yang kompeten diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

New Public Management (NPM) menurut Mardiasmo, (2018) merupakan sebuah konsep perubahan manajemen sektor publik yang awalnya terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi fleksibel dan dapat mengakomodasi pasar. Konsep perubahan manajemen salah satunya dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Manajemen dalam menjalankan komitmen organisasi harus dapat mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan agar organisasi dapat sukses dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah kesiapan dan koordinasi seluruh pegawai untuk melaksanakan peran serta kewenangan masing-masing serta komitmen yang kuat oleh seluruh pihak dalam suatu organisasi.

Komitmen terhadap organisasi bukan hanya sekedar keanggotaan formal karena manajemen harus memiliki sikap menyukai organisasi dan bersedia untuk mengusahakan kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan organisasi. Setiap pekerja akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dengan adanya komitmen (Mutiana et. al., 2017). Mereka akan termotivasi melaporkan segala aktivitasnya termasuk dalam hal penyusunan

laporan keuangan. Jika komitmen organisasi telah terbangun, maka akan mendukung tercapainya tujuan (Irfani et al., 2020). Tujuan yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Maulana dan Lubis (2020), Laporan Keuangan Pemerintah adalah pernyataan (asersi) dari pihak pemerintah yang menginformasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) mengenai keadaan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan seperti akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity), dan evaluasi kinerja”

Kualitas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang lengkap, transparan, dirancang supaya tidak menyesatkan kepada pengguna, dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Redjo, 2018). Menurut Imam (2017) sebuah informasi yang berkualitas akan menghasilkan keputusan yang berkualitas (garbage in garbage out) pula. Informasi yang telah diperoleh hanya akan bermanfaat bagi Kepala Daerah jika informasi tersebut memenuhi syarat kualitas tertentu. Oleh karena itu, kualitas informasi harus menjadi perhatian penting bagi Kepala Daerah. Laporan keuangan daerah yang berkualitas haruslah memenuhi tingkat karakteristik yang memadai. Karakteristik yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam bentuk informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP memiliki empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kualitas yang dikehendaki yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.”
(PP Nomor 71 Tahun 2010)

2.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat atau individu atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas untuk memperoleh tujuan yang ditetapkan (Hamsinar, 2017). Iyoha dan Oyerinde (2010) mengatakan bahwa akuntabilitas mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan terkait dengan sumber dan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya publik. Akuntabilitas publik melibatkan berbagai mekanisme yang tersedia untuk menjelaskan kebijakan dan kegiatan organisasi untuk berkomunikasi kepada pejabat pemerintah dengan mudah dan langsung melalui dengar pendapat publik, media massa, atau bahkan melalui alat komunikasi real time (Ahyaruddin dan Akbar, 2017). Akuntabilitas biasanya terkait dengan pengawasan, pengendalian perilaku pemerintah, pencegahan pembangunan konsentrasi kekuasaan, dan peningkatan kemampuan belajar serta efektivitas administrasi publik (Iyoha dan Oyerinde, 2010).

Akuntabilitas keuangan menurut Hamsinar (2017) merupakan proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan atau undang-undang. Akuntabilitas keuangan memiliki berbagai instrumen seperti anggaran, data yang dipublikasikan secara berkala, laporan tahunan, laporan hasil pemeriksaan, dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh pihak yang independen. Peran masyarakat tidak hanya sebatas mengetahui pengelolaan

keuangan pemerintah daerah, tetapi masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Kusuma, 2012).

2.2.3 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan proses yang penting dalam mendesain, mengimplementasikan, dan menggunakan sistem pengukuran kinerja (Sofyani dan Akbar, 2013). Komitmen menurut Noprizal (2017) adalah suatu keadaan individu yang memihak kepada organisasi dan memiliki keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasi bukan hanya sekedar keanggotaan formal karena manajemen harus memiliki sikap menyukai organisasi dan bersedia untuk mengusahakan kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan organisasi. Setiap pekerja akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dengan adanya komitmen (Mutiana et. al., 2017). Mereka akan termotivasi melaporkan segala aktivitasnya termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan.

Sejalan dengan isomorfisme institusional, komitmen organisasi secara normatif merupakan bentuk dari perjuangan kolektif anggota organisasi dalam menentukan kondisi dan metode kerja agar tercapai profesionalisme (Sofyani dan Akbar, 2013). Manajemen dalam menjalankan komitmen harus dapat mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan agar organisasi dapat sukses dalam jangka panjang. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan melalui perilaku dan tindakan yang tepat. Pejabat pemerintahan yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimilikinya untuk menyusun laporan

keuangan menjadi relatif lebih tepat (Mutiana et. al., 2017). Selain itu, Sihaloho et al. (2013) mengatakan manajemen secara pribadi dapat terlibat untuk memastikan bahwa sistem manajemen SKPD yang dikembangkan dan diimplementasikan sudah berjalan.

2.2.4 Kompetensi SDM

Yosefrinaldi (2013) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi karena sumber daya manusia adalah salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku seorang Pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sumber daya manusia yang kompeten diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Seiring dengan perubahan yang terjadi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya kinerja pelaksanaan pemerintahan (Mutiana et. al., 2017).

Kompetensi Sumber Daya Manusia menurut Ferdian (2014) merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk memberikan kinerja yang memadai terhadap suatu fungsi pekerjaan. Kompetensi terkait dengan kemampuan, inteligensi, dan profesionalitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kegagalan dalam memahami dan menerapkan logika

akuntansi akan berdampak pada ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan, akibatnya laporan keuangan yang dibuat tidak berkualitas baik (Maksyur, 2015). Jika kompetensi sumber daya manusia pada pemerintahan baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah pun akan baik dan memenuhi karakteristik kualitatif (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan). Apabila sumber daya manusia pemerintah tidak memiliki salah satu kualitas yang disyaratkan, maka memungkinkan timbulnya hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi sehingga kualitas informasi keuangan yang dihasilkan menjadi buruk (Mutiana et. al., 2017).

2.2.5 Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Tekanan eksternal menurut Syahril et al. (2018) yaitu suatu organisasi terdapat peraturan pemerintah dan undang – undang yang berlaku sehingga jika tidak mematuhi peraturan tersebut menyebabkan suatu hal terjadi, harus ada strategi atau jalan keluar untuk menghadapi kejadian tersebut. Peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik pemerintahan agar dapat berjalan lebih baik (Ridha dan Basuki, 2012). Akan tetapi, dalam praktiknya, peraturan- peraturan daerah tersebut masih sulit dijalankan, terkadang mendapat penolakan dari masyarakat (Noprizal, 2017). Tekanan eksternal berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar organisasi atau pemerintahan yang sedang berjalan.

Dukungan maupun penolakan sebuah kebijakan berasal dari luar organisasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sebagai contoh, dukungan maupun penolakan dari masyarakat, dorongan atau larangan dari Pemerintah dalam bentuk peraturan atau hukum, dan norma yang berlaku di masyarakat. Merantika dan Heriyanto (2017) mengatakan perubahan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi terpengaruh oleh adanya faktor politik. Peningkatan kualitas laporan keuangan hanya akan bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi. Tekanan eksternal membuat seluruh anggota organisasi melaksanakan proses kegiatan operasional dengan semestinya dan proses tersebut dilakukan dengan lebih terbuka. Apabila proses tersebut berhasil dilaksanakan, tentu kualitas pelaporan keuangan mengalami peningkatan (Noprizal, 2017).

2.2.6 Transparansi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang materiil dan relevan. Keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi merupakan bentuk transparansi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemangku kepentingan. Kepercayaan masyarakat akan meningkat seiring dengan adanya transparansi dari pemerintah, hal ini dikarenakan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah membutuhkan kepercayaan dari masyarakat sebagai modal yang penting untuk berjalannya pemerintahan. Dukungan pemerintah lahir dalam menjalankan program- programnya dikarenakan peningkatan kepercayaan dari

masyarakat (Kusuma, 2012). Hamsinar (2017) menjelaskan lebih lanjut mengenai transparansi dan keterbukaan dapat menciptakan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi transparansi bukan hanya memberikan informasi kepada masyarakat, transparansi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah khususnya pelayanan publik (Septiani, 2020).

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Putri dan Akbar (2022), Wibowo (2022), Suryani (2021), Tahir et al. (2020), Winarni dan Akbar (2020), Maulana dan Lubis (2020), Tampubolon dan Hasibuan (2019), Merantika dan Heriyanto (2017), Merialsa (2017), Riyanti (2017), Wijayanti dan Handayani (2017), dan lainnya.

Putri dan Akbar (2022) menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Surabaya. Studi ini merupakan penelitian kuantitatif memakai kuesioner yang diberikan secara pribadi menggunakan sampel dan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan PLS-SEM. Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan kompetensi SDM memengaruhi secara signifikan pada kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian dari Wibowo (2022) menguji determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif statistik menggunakan model empiris dengan uji regresi linear berganda dan melakukan pengambilan sampel dengan kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Penelitian dari Suryani (2021) mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan melalui sumber daya manusia. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Model analisis data yang digunakan adalah path analysis (analisis jalur). Data diolah dengan menggunakan SmartPLS. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variabel transparansi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tahir et al. (2020) meneliti apakah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan Kepala Desa, dan transparansi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa dengan metodologi penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara random atau acak (Probability Sampling) dengan teknik sampling acak sederhana (Simple Random

Sampling). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan Kepala Desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Pamekasan.

Penelitian dari Winarni dan Akbar (2020) meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas informasi akuntansi pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya bukti yang kuat mengenai pengaruh tekanan eksternal dan internal institusional terhadap kualitas informasi akuntansi pada laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dari Winarni dan Akbar (2020) tidak sejalan dengan penelitian dari Lubis (2017) yang membuktikan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Maulana dan Lubis (2020) meneliti pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan di Pemerintahan Kota Medan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode non probability sampling berdasarkan sampel kebetulan (accidental sampling). Data diolah menggunakan metode uji statistik regresi linear berganda. Secara pengujian, transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hernanda (2020) meneliti pengaruh komitmen organisasi, pelaksanaan anggaran, dan implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode sensus terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai responden. Alat yang digunakan untuk menganalisis

data dalam penelitian menggunakan SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan untuk Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian dari Nugroho dan Setyowati (2019) menganalisis pengaruh komitmen organisasional, sistem informasi akuntansi, dan internal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Data yang digunakan diperoleh melalui kuesioner dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasional, sistem informasi akuntansi, dan audit internal memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Penelitian dari Tampubolon dan Hasibuan (2019) bertujuan untuk mengevaluasi adanya pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Analisis data dilakukan dengan model regresi Linear berganda dengan software SPSS versi 25.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian dari Nugroho (2018) bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), kompetensi sumber daya manusia (SDM), penerapan sistem pengendalian intern (SPI), pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada BKD Kabupaten Boyolali. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel penerapan SAP, penerapan SPI, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Merantika dan Heriyanto (2017) meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data penelitian menggunakan survei kuesioner. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program smart PLS 2.0. Analisis data menggunakan model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model), terlebih dahulu dilakukan Metode Suksesif Interval (MSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian dari Wijayanti dan Handayani (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten

Madiun. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian menggunakan data primer. Sumber data yang digunakan yaitu hasil pengisian kuesioner oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala kantor dan kepala bagian keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Madiun. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 20.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian dari Merialsa (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada inspektorat Kota Bandung dan BPKAD Kota Bandung. Data yang digunakan yaitu data angket (kuesioner). Teknik pemilihan sampel yaitu non probability sampling dengan sampel jenuh yang dipilih. Analisis data statistik dilakukan dengan mengolah data dari hasil jawaban kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada inspektorat Kota Bandung dan BPKAD Kota Bandung.

Riyanti (2017) meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sukoharjo. Penelitian merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan ke responden. Data dianalisis dengan menggunakan regresi Linear berganda dengan

menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan transparansi dan penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dari Hamsinar (2017) menganalisa mengenai pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis variabel moderasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sedangkan sistem pengendalian intern mampu memoderasi akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Septiningtyas (2017) meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, pemahaman standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Kendal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada

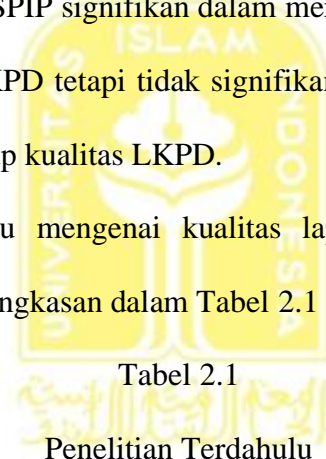
OPD di Kabupaten Kendal. Sedangkan pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Kabupaten Kendal.

Penelitian dari Mutiana et al. (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pada satker di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada KPA dan penyusun laporan keuangan selaku responden. Teknik analisis data dalam menguji hipotesis penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada satker di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

Maksyur (2015) meneliti pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian Syarifudin (2014) bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian internal pemerintah. Hasil menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tetapi kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah, sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian hasil pengujian juga menunjukkan bahwa SPIP signifikan dalam memediasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD tetapi tidak signifikan dalam memediasi pengaruh peran audit internal terhadap kualitas LKPD.

Penelitian terdahulu mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada ringkasan dalam Tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

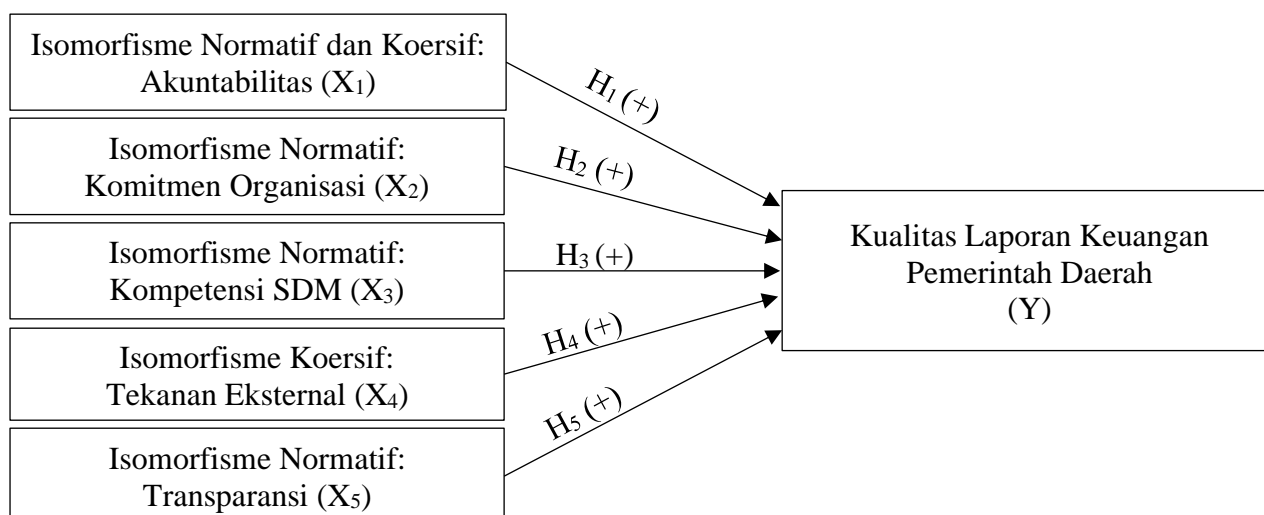
No	Variabel	Hipotesis Diterima	Hipotesis DiTolak
1	Akuntabilitas	Riyanti (2017), Hamsinar (2017), Tahir et al. (2020), dan Wibowo (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Septiningtyas (2017) dan Putri dan Akbar (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2	Komitmen Organisasi	Maksyur (2015), Mutiana et al. (2017), Nugroho (2018), dan Nugroho dan Setyowati (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Tampubolon dan Hasibuan, (2019) dan Hernanda (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3	Kompetensi SDM	Merantika dan Heriyanto (2017), Nugroho (2018), dan Tampubolon dan Hasibuan (2019) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Syarifudin (2014), Wijayanti dan Handayani (2017), dan Wibowo (2022) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Tekanan Eksternal	Merantika dan Heriyanto (2017), Lubis (2017), dan Winarni dan Akbar (2020) menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Lubis (2017) membuktikan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah
5	Transparansi	Merialsa (2017), Maulana dan Lubis (2020), dan Wibowo (2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Riyanti (2017), Septiningtyas (2017), Suryani (2021), dan Putri dan Akbar (2022) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh antara akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Teori institusional dapat menjelaskan hubungan antara akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara tradisional teori institusional mengemukakan bahwa akuntabilitas ditegakkan pada organisasi oleh faktor eksternal seperti asosiasi profesional dan negara. Teori institusional atau teori kelembagaan menurut Midin et al. (2016) merupakan peristiwa di mana lingkungan institusional atau kelembagaan dapat memengaruhi perkembangan struktur formal dalam sebuah organisasi. Pada penelitian ini, isomorfisme koersif merupakan pendorong utama yang terjadi karena adanya desakan formal yang memaksa Pemerintah Daerah untuk mematuhi dan mengimplementasikan Peraturan atau Undang-Undang untuk dapat meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, akuntabilitas juga termasuk ke dalam isomorfisme normatif (normative) karena dalam proses pertanggungjawaban keuangan organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi. Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan atau undang-undang.

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang dapat dipertanggungjawaban oleh pihak yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat atau individu atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas untuk memperoleh tujuan yang ditetapkan (Hamsinar, 2017). Iyoha dan Oyerinde (2010) mengatakan bahwa akuntabilitas mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan

terkait dengan sumber dan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya publik. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Mursyidi, 2013).

Selain itu pola pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan keuangan negara juga sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*) di mana akuntabilitas dapat menciptakan hubungan keagenan antara Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai agen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertindak sebagai wakil dari prinsipal (Redjo, 2018). DPRD tidak memiliki informasi secara penuh mengenai laporan pertanggungjawaban eksekutif atas pengelolaan anggaran. Hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah pertanggungjawaban pengelolaan anggaran telah mencerminkan kondisi sesungguhnya (laporan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sistem pengendalian internal telah diterapkan, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut telah diungkapkan secara penuh).

Akuntabilitas publik melibatkan berbagai mekanisme yang tersedia untuk menjelaskan kebijakan dan kegiatan organisasi untuk berkomunikasi kepada pejabat pemerintah dengan mudah dan langsung melalui *dengar pendapat publik*, media massa, atau bahkan melalui alat komunikasi real time (Ahyaruddin dan Akbar, 2017). Apabila akuntabilitas lemah menunjukkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas. Budaya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dapat terjadi apabila akuntabilitas keuangan tidak berjalan dengan baik. Menurut Akbar et. al. (2015), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dibuat oleh pemerintah daerah belum memberikan kepuasan dan keyakinan kepada

masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat diatasi apabila pemerintah daerah membudayakan akuntabilitas laporan keuangan. Apabila akuntabilitas tercapai maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menjadi semakin baik.

Penelitian dari Riyanti (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hamsinar (2017) menyatakan akuntabilitas memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern. Tahir et. al. (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5.2 Pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Nilai dan prinsip suatu organisasi tercipta dari suatu proses institusionalisasi karakter yang ditentukan oleh komitmen organisasi. Komitmen organisasi terwujud dalam artian profesionalisme organisasi dalam mematuhi, menjalankan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan dan hukum di organisasi. Teori institusional harus mengadopsi perspektif internal untuk memahami dengan tepat bagaimana sistem dan makna kelembagaan harus dipahami dan ditafsirkan dalam organisasi (Suddaby, 2010). Dengan demikian, regulator dan stakeholder dapat memberikan tekanan berupa perubahan positif yaitu meningkatkan komitmen manajemen yang berasal dari internal institusional dalam usaha meningkatkan kualitas informasi

akuntansi sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat berkualitas (Winarni dan Akbar, 2020).

DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa isomorfisme normatif (normative) terjadi ketika organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi. Komitmen organisasi merupakan proses yang penting dalam mendesain, mengimplementasikan, dan menggunakan sistem pengukuran kinerja (Sofyani dan Akbar, 2013). Komitmen menurut Noprizal (2017) adalah suatu keadaan individu yang memihak kepada organisasi dan memiliki keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasi bukan hanya sekedar keanggotaan formal karena manajemen harus memiliki sikap menyukai organisasi dan bersedia untuk mengusahakan kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan organisasi. Setiap pekerja akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dengan adanya komitmen (Mutiana et. al., 2017). Mereka akan termotivasi melaporkan segala aktivitasnya termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan.

Sejalan dengan isomorfisme institusional, komitmen organisasi secara normatif merupakan bentuk dari perjuangan kolektif anggota organisasi dalam menentukan kondisi dan metode kerja agar tercapai profesionalisme (Sofyani dan Akbar, 2013). Manajemen dalam menjalankan komitmen harus dapat mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan agar organisasi dapat sukses dalam jangka panjang. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan melalui perilaku dan tindakan yang tepat. Pejabat pemerintahan yang memiliki komitmen organisasi

tinggi akan menggunakan informasi yang dimilikinya untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat (Mutiana et. al., 2017). Selain itu, Sihaloho et al. (2013) mengatakan manajemen secara pribadi dapat terlibat untuk memastikan bahwa sistem manajemen SKPD yang dikembangkan dan diimplementasikan sudah berjalan.

New Public Management (NPM) menurut Mardiasmo, (2018) merupakan sebuah konsep perubahan manajemen sektor publik yang awalnya terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi fleksibel dan dapat mengakomodasi pasar. Konsep perubahan manajemen salah satunya dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Manajemen dalam menjalankan komitmen organisasi harus dapat mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan agar organisasi dapat sukses dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah kesiapan dan koordinasi seluruh pegawai untuk melaksanakan peran serta kewenangan masing-masing serta komitmen yang kuat oleh seluruh pihak dalam suatu organisasi. Jika komitmen organisasi telah terbangun, maka akan mendukung tercapainya tujuan (Irfani et al., 2020). Tujuan yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian dari Maksyur (2015) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Mutiana et al. (2017) dalam penelitiannya menyatakan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satker di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Penelitian dari Nugroho dan Setyowati (2019) menyatakan komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.5.3 Pengaruh antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan menggunakan teori institusional. Teori institusional harus mengadopsi perspektif internal untuk memahami dengan tepat bagaimana sistem dan makna kelembagaan harus dipahami dan ditafsirkan dalam organisasi (Suddaby, 2010). Salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi adalah sumber daya manusia (Marsdenia dan Arthaingan, 2016). Dengan demikian, regulator dan stakeholder dapat memberikan tekanan berupa perubahan positif yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berasal dari internal institusional dalam usaha meningkatkan kualitas informasi akuntansi (Winarni dan Akbar, 2020).

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam penilaian profesionalisme. DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa isomorfisme normatif terkait dengan profesionalisme. Profesionalisme merupakan suatu hal yang terkait dengan integritas dan kompetensi sumber daya manusia di organisasi atau instansi itu sendiri (Ferdian, 2014). Sumber daya manusia menurut Zhou (2010) merupakan faktor penentu dalam perkembangan informasi akuntansi

sehingga kualitas profesional sumber daya manusia harus ditingkatkan agar pemerintah daerah dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Penerapan New Public Management merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui rekrutmen pegawai berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis akuntansi (Irfani et al., 2020). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku seorang Pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sumber daya manusia yang kompeten diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Seiring dengan perubahan yang terjadi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya kinerja pelaksanaan pemerintahan (Mutiana et. al., 2017).

Kompetensi Sumber Daya Manusia menurut Ferdian (2014) merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk memberikan kinerja yang memadai terhadap suatu fungsi pekerjaan. Kompetensi terkait dengan kemampuan, inteligensi, dan profesionalitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kegagalan dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan, akibatnya laporan keuangan yang dibuat tidak berkualitas baik (Maksyur, 2015). Jika kompetensi sumber daya manusia pada pemerintahan baik,

maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah pun akan baik dan memenuhi karakteristik kualitatif (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan). Apabila sumber daya manusia pemerintah tidak memiliki salah satu kualitas yang disyaratkan, maka memungkinkan timbulnya hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi sehingga kualitas informasi keuangan yang dihasilkan menjadi buruk (Mutiana et. al., 2017).

Penelitian dari Merantika dan Heriyanto (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Tampubolon dan Hasibuan (2019) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dari Nugroho (2018) menunjukkan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.5.4 Pengaruh antara tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Tekanan eksternal seperti peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Pengaruh tekanan eksternal seperti regulasi maupun stakeholder ke arah yang positif dapat mendorong kualitas informasi akuntansi (Nalukenge et al., 2012). Tekanan eksternal khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas informasi akuntansi antara lain berasal dari organisasi induk,

regulasi, maupun stakeholder (Nurdin et al., 2012). Tekanan eksternal berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar organisasi atau pemerintahan yang sedang berjalan. Salah satu contoh adanya regulasi atau peraturan yang secara eksplisit atau formal diberlakukan untuk menyusun struktur institusi pemerintah agar berperilaku dengan cara tertentu. Stakeholder memiliki peran penting yaitu memastikan proses akuntansi, pelaporan relevan, dan mencerminkan isu utama, aspirasi dan kepentingan (Olesson et al., 2012).

Lingkungan kelembagaan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam proses institusionalisasi karena organisasi memiliki ketergantungan yang tinggi dengan lingkungan kelembagaannya sehingga melahirkan aturan, nilai, dan praktik baru yang menjadi bagian dari organisasi (Mariandini et al., 2018). Teori institusional berkaitan dengan bagaimana organisasi menyusun diri mereka sendiri dan mendapatkan penerimaan dan legitimasi yang mungkin mengorbankan efisiensi. Organisasi bukan hanya berkompetisi untuk memperoleh sumber daya dan customer tetapi juga mendapatkan kekuatan politik, legitimasi institusi, dan untuk kepentingan sosial (Kisworo dan Shauki, 2019). Tekanan eksternal dikategorikan ke dalam isomorfisme koersif menurut DiMaggio dan Powell (1983) karena kebijakan tertentu diadopsi oleh tekanan atau kekuatan yang memaksa. Sofyani dan Akbar (2015) menyatakan isomorfisme koersif merupakan hasil dari tekanan formal maupun informal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem.

Tekanan eksternal merupakan dorongan atau penolakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang berasal dari luar organisasi maupun dorongan atau larangan dari pemerintah dalam bentuk peraturan atau tatanan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Tekanan eksternal yang sangat berpengaruh adalah tekanan yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Merantika dan Heriyanto (2017) mengatakan perubahan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi terpengaruh oleh adanya faktor politik. Peningkatan kualitas laporan keuangan hanya akan bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi. Tekanan eksternal membuat seluruh anggota organisasi melaksanakan proses kegiatan operasional dengan semestinya dan proses tersebut dilakukan dengan lebih terbuka. Sebagai contoh seperti menggunakan tenaga auditor eksternal yang bersifat independen. Apabila proses tersebut berhasil dilaksanakan, tentu kualitas pelaporan keuangan mengalami peningkatan (Noprizal, 2017).

Penelitian dari Merantika dan Heriyanto (2017) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Lubis (2017) menyatakan tekanan eksternal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Winarni dan Akbar (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.5.5 Pengaruh antara transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Perspektif teori kelembagaan menggambarkan struktur organisasi di mana organisasi menerima sesuatu yang sesuai dengan kode etik budaya, yang kemudian mengarah pada legitimasi dan dukungan dari organisasi eksternal (DiMaggio dan Powell, 1983; Ahyaruddin dan Akbar, 2017; Surachman dan Astuti, 2020). Kepercayaan masyarakat akan meningkat seiring dengan adanya transparansi dari pemerintah, hal ini dikarenakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat. Pemerintah membutuhkan kepercayaan dari masyarakat sebagai modal yang penting untuk jalannya pemerintahan. Dukungan pemerintah lahir dalam menjalankan program-programnya dikarenakan peningkatan kepercayaan dari masyarakat (Kusuma, 2012). Hamsinar (2017) menjelaskan lebih lanjut mengenai transparansi dan keterbukaan dapat menciptakan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi termasuk ke dalam isomorfisme normatif. Isomorfisme normatif terjadi ketika organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi (DiMaggio dan Powell, 1983). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang materiil dan relevan. Proses pengambilan keputusan dan keterbukaan pemerintah tentunya mengadopsi nilai dan organisasi lain dalam pelaksanaannya sebagai hasil

dari profesionalisasi. Nilai dan prinsip kepatuhan merupakan suatu hal yang harus dipegang dan dilakukan dalam mengelola keuangan organisasi agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkat (Putra, 2016).

Transparansi kebijakan publik bersifat terbuka bagi masyarakat dari mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Fungsi transparansi bukan hanya memberikan informasi kepada masyarakat, transparansi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah khususnya pelayanan publik (Septiani, 2020). Masyarakat dapat mengakses informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka dan mudah (Sofyani dan Akbar, 2013).

Penelitian dari Hamsinar (2017) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Merialsa (2017) dalam penelitiannya mengatakan transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Maulana dan Lubis (2020) menyatakan bahwa transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Arikunto (2013) menjelaskan penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka mulai dari proses pengumpulan data, penafsiran terhadap data, dan penampilan hasil data. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu guna memperoleh data yang berbentuk angka berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Data penelitian berasal dari sampel populasi dan dianalisis sesuai dengan metode statistik kemudian diinterpretasikan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian dan merupakan tempat generalisasi hasil penelitian (Hadi, 2012). Populasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV. Alasan memilih populasi tersebut dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk delapan entitas pemeriksaan yaitu enam pemerintah daerah kabupaten dan dua pemerintah kota dan

satu opini Tidak Wajar (TW). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Sedangkan opini Tidak Wajar (TW) diberikan kepada Kabupaten Jember.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016). Hadi (2012) mendefinisikan sampel sebagai bagian atau populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kepala atau staf atau pegawai di bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV, merupakan pegawai pemerintahan yang membuat laporan keuangan pemerintah, dan mengetahui proses pembuatan laporan keuangan. Pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan kemudahan (*purposive sampling*). Responden dalam penelitian adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pengelola Laporan Keuangan di SKPD seperti dinas, kantor, dan badan, sudah menjabat minimal 1 (satu) tahun atau lebih di SKPD tersebut, dan telah memahami situasi dan kondisi serta terlibat dalam pelaporan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam menjamin kualitas pelaporan keuangan.

3.3 Sumber Data, Instrumen Data, dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data menurut Arikunto (2013) adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016), "Data primer adalah

sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (melalui perantara)”. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner responden yang dijadikan sampel dalam penelitian, sedangkan data sekunder didapatkan dari sumber atau badan independen penyedia data seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPK Jawa Timur), Badan Pusat Statistik (BPS), dan sumber lainnya.

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar menjadi sistematis (Arikunto, 2013). Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner. Menurut Sugiyono (2016) definisi angket atau kuesioner merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan ditunjukkan langsung kepada responden.

Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah teknik skala likert. Skala likert menurut Sugiyono (2016) adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial sesuai dengan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Setiap butir pertanyaan merupakan pernyataan positif yang diberikan skor 1 (satu) sampai 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2: Tidak Setuju (TS)

Angka 3: Netral (N)

Angka 4: Setuju (S)

Angka 5: Sangat Setuju (SS).

Responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang telah disediakan. Metode jajak pendapat (survei) dengan menyebarkan kuesioner kepada responden digunakan karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainnya (Arikunto, 2013). Menurut Sugiyono (2016), pengertian variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Redjo (2018) mendefinisikan kualitas laporan keuangan sebagai penyajian informasi yang lengkap, transparan, dirancang supaya tidak menyesatkan kepada pengguna, dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan indikator sebagai berikut:

- a. Relevan dengan sub indikator memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.

- b. Andal dengan sub indikator penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.
- c. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- d. Dapat dipahami oleh penggunanya

Variabel ini akan diukur menggunakan instrumen skala likert 1-5 dengan 16 item pernyataan sesuai pertanyaan yang telah dikembangkan oleh Sudiarianti et al. (2015) dan Nugroho (2018).

3.4.2 Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya (Arikunto, 2013). Sugiyono (2016) menjelaskan variabel bebas sebagai variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Penelitian ini menggunakan variabel independen antara lain: akuntabilitas, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, tekanan eksternal, dan transparansi.

3.4.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat atau individu atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas untuk memperoleh tujuan yang ditetapkan (Hamsinar, 2017). Iyoha dan Oyerinde (2010) mengatakan bahwa akuntabilitas mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan terkait dengan sumber dan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya publik. Indikator akuntabilitas dalam penelitian ini mengacu pada penelitian dari Asroel et

al. (2016) dan Hamsinar (2017) yaitu integritas keuangan, pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban horizontal, dan pertanggungjawaban vertikal. Variabel ini akan diukur menggunakan instrumen skala likert 1-5 dengan 10 (sepuluh) item pertanyaan.

3.4.2.2 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan proses yang penting dalam mendesain, mengimplementasikan, dan menggunakan sistem pengukuran kinerja (Sofyani dan Akbar, 2013). Komitmen organisasi menurut Wibowo (2017) berkaitan dengan sejauh mana dan bagaimana keterlibatan seseorang dengan organisasi. Indikator komitmen organisasi menurut Maksyur (2015) yaitu memiliki kepercayaan yang kuat, menerima nilai-nilai organisasi, menerima tujuan organisasi, adanya kemauan yang kuat untuk berusaha atau bekerja keras untuk organisasi, dan adanya keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Variabel ini akan diukur menggunakan instrumen skala likert 1-5 dengan 5 (lima) item pertanyaan.

3.4.2.3 Kompetensi SDM

Kompetensi sumber daya manusia menurut Ihsanti (2014) adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi dan/ atau kewenangan dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kompetensi terkait dengan kemampuan, inteligensi, dan profesionalitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Indikator kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada penelitian ini mengadopsi dari penelitian Sudiarianti et al. (2015) dan Nugroho (2018) yaitu

aspek pengetahuan (knowledge), aspek keahlian (skill), dan aspek perilaku (attitude). Variabel ini akan diukur menggunakan instrumen skala likert 1-5 dengan 6 (enam) item pertanyaan.

3.4.2.4 Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas informasi akuntansi antara lain berasal dari organisasi induk, regulasi, maupun stakeholder (Nurdin et al., 2012). Tekanan eksternal menurut Syahril et al. (2018) yaitu suatu organisasi terdapat peraturan pemerintah dan undang – undang yang berlaku sehingga jika tidak mematuhi peraturan tersebut menyebabkan suatu hal terjadi, harus ada strategi atau jalan keluar untuk menghadapi kejadian tersebut. Ridha dan Basuki (2012) menyebutkan bahwa peraturan dan perundang-undangan merupakan indikator adanya tekanan eksternal dalam bentuk koersif pada penyusunan laporan keuangan. Indikator tekanan eksternal menurut Putra (2016) dan Merantika dan Heriyanto (2017) diantaranya: perubahan peraturan/ perundang-undangan, tuntutan pemimpin, tuntutan masyarakat, pemberitaan media massa, dan perhatian lebih dari lembaga swadaya masyarakat. Variabel ini akan diukur menggunakan instrumen skala likert 1-5 dengan 5 (lima) item pertanyaan.

3.4.2.5 Transparansi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang materiil dan relevan. Hamsinar (2017) menjelaskan lebih lanjut mengenai

transparansi dan keterbukaan dapat menciptakan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan. Indikator transparansi pada penelitian ini bersumber dari penelitian Putra (2016) dan Riyanti (2017), diantaranya:

- a. Informasi pencapaian SKPD dalam laporan keuangan
- b. Informasi ketidakberhasilan pencapaian SKPD dalam laporan keuangan
- c. Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.
- d. Informasi keuangan mengenai input, output, dan outcome secara terbuka
- e. Menyediakan akses kepada pemangku kepentingan atas laporan keuangan.
- f. Terakomodasinya suara/ usulan rakyat
- g. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Variabel ini akan diukur menggunakan instrumen skala likert 1-5 dengan 7 (tujuh) item pertanyaan.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan fakta (Ghozali, 2018). Uji validitas pearson correlation dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Suatu instrumen dikatakan valid jika nilai r pearson correlation terhadap skor total di atas 0,30 atau koefisien korelasi $> 0,30$ (Ghozali, 2018).

Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan metode cronbach alpha (α). Uji reliabilitas cronbach alpha (α) menggunakan alat bantu software IBM SPSS Statistics 25. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dapat dipercaya. Jika hasil perhitungan mendapatkan nilai cronbach alpha (α) lebih besar dari r tabel maka instrumen dinyatakan cukup reliabel (Sugiyono, 2020). Suatu instrumen dikatakan reliabel jika koefisien cronbach alpha (α) yang didapat lebih besar dari 0,70 atau $\alpha > 0,70$ (Ghozali, 2016).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2017) apabila sebuah diagonal dari grafik terdapat adanya persebaran data (titik) yang mengikuti atau mendekati arah garis diagonal maka terdapat normalitas, namun apabila persebaran data (titik) menjauhi garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka tidak terdapat normalitas. Asumsi normalitas dalam model regresi linear ditunjukkan oleh nilai error (ϵ) yang berdistribusi normal. Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program software IBM SPSS Statistics 25 digunakan untuk menguji normalitas data. Ghozali (2018) menyatakan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (asymptotic significance $> 0,05$) maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (asymptotic significance $< 0,05$) maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat korelasi antar variabel independen (Hadi, 2012). Menurut Santoso (2020), terdapat problem multikolinearitas jika ditemukan korelasi antar variabel bebas. Jika terdapat problem multikolinearitas, sebaiknya salah satu dari variabel independen dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali. Model regresi yang normal menurut Ghozali (2017) yaitu memiliki nilai tolerance value lebih dari 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10,00 dan apabila nilai tolerance value kurang dari 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih dari 10,00 maka terjadi multikolinearitas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan varian dan nilai residu pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2017). Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplots dan uji glejser. Uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplots menurut Ghozali (2017) antara lain:

- a. Terjadi heteroskedastisitas apabila terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur.
- b. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak terdapat pola yang membentuk pola tertentu dan teratur, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Menurut Gujarati yang dikutip oleh Ghozali (2017) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (Sugiyono, 2020). Menurut Ghozali (2017), apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas) (Hadi, 2012).

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan apabila terdapat minimal dua variabel independen. Sugiyono (2016: 277) mengatakan bahwa:

“Analisis regresi Linear berganda bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).”

Penggunaan analisis ini untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, tekanan eksternal, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Model regresi Linear berganda pada penelitian ini diadaptasi dari model Sugiyono (2020) yang ditunjukkan oleh persamaan berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
α	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= koefisien regresi
X ₁	= akuntabilitas
X ₂	= komitmen organisasi
X ₃	= kompetensi SDM
X ₄	= tekanan eksternal
X ₅	= transparansi
ε	= eror

3.5.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menurut Sugiyono (2016) dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar pengaruh kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) hanya antara 0-1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin kecil nilai koefisien determinasi (R^2) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Jika nilai koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati 1 (satu) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat (Sugiyono, 2020). Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah Adjusted R Square (Ghozali, 2018).

3.5.5 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Hadi (2012) tujuan dari uji parsial (uji t) adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan uji parsial (uji t) berdasarkan nilai t hitung dengan nilai t tabel menurut Ghozali (2018) adalah sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen apabila H_0 ditolak, sedangkan variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen apabila H_0 diterima.

Berdasarkan nilai signifikansi, pengambilan keputusan uji parsial (uji t) menurut Ghozali (2018) adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 ($\text{Sig. } X \leq 0,05$), maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($\text{Sig. } X > 0,05$), maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

4.1.1 Persebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan di seluruh instansi pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV. Wilayah Pemeriksaan Subauditoriat Jawa Timur IV merupakan wilayah tapal kuda di Provinsi Jawa Timur, wilayah ini terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Penelitian dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Desember 2022. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kepala atau staf atau pegawai di bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV, merupakan pegawai pemerintahan yang membuat laporan keuangan pemerintah, dan mengetahui proses pembuatan laporan keuangan. Pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan kemudahan (purposive sampling). Responden dalam penelitian adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pengelola Laporan Keuangan di SKPD seperti dinas, kantor, dan badan, sudah menjabat minimal 1 (satu) tahun atau lebih di SKPD tersebut, dan telah memahami situasi dan kondisi serta terlibat dalam pelaporan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam menjamin kualitas pelaporan keuangan.

Menurut Hair et al. (2010), minimal jumlah sampel apabila menggunakan analisis regresi berganda adalah 15-20 kali jumlah variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 6 variabel (1 dependen dan 5 independen) sehingga sampel dalam

penelitian ini adalah minimal 120 responden (6 x 20). Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden sebanyak 210 kuesioner. Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 186 kuesioner dan 24 data tidak lengkap/tidak kembali. Berikut ini Tabel 4.1 keterangan lebih lengkap mengenai persebaran kuesioner:

Tabel 4.1

Data Persebaran Kuesioner

Kabupaten/Kota	Sebar	Tidak Lengkap (Tidak Kembali)	Lengkap
Kabupaten Banyuwangi	20	2	18
Kabupaten Bondowoso	25	4	21
Kabupaten Jember	25	2	23
Kabupaten Lumajang	25	4	21
Kabupaten Pasuruan	20	1	19
Kabupaten Probolinggo	20	2	18
Kabupaten Situbondo	25	3	22
Kota Pasuruan	25	4	21
Kota Probolinggo	25	2	23
TOTAL	210	24	186

Sumber: Hasil data diolah (2023)

4.1.2 Analisis Data Responden

4.1.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 186 responden diperoleh data 112 responden berjenis kelamin laki laki (60,22%) dan 74 responden berjenis kelamin perempuan (39,78%). Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		TOTAL
	Laki-laki	Perempuan	
Kabupaten Banyuwangi	9	9	18
Kabupaten Bondowoso	11	10	21
Kabupaten Jember	18	5	23
Kabupaten Lumajang	14	7	21
Kabupaten Pasuruan	9	10	19
Kabupaten Probolinggo	8	10	18
Kabupaten Situbondo	15	7	22
Kota Pasuruan	13	8	21
Kota Probolinggo	15	8	23
TOTAL	112	74	186
PERSENTASE	60,22%	39,78%	100,00%

Sumber: Hasil data diolah (2023)

4.1.2.2 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kabupaten/Kota	Pendidikan Terakhir					TOTAL
	DIII	DIV/S1	S2	S3	Lainnya	
Kabupaten Banyuwangi	0	16	2	0	0	18
Kabupaten Bondowoso	1	18	2	0	0	21
Kabupaten Jember	0	17	6	0	0	23
Kabupaten Lumajang	0	18	3	0	0	21
Kabupaten Pasuruan	1	17	1	0	0	19
Kabupaten Probolinggo	2	13	3	0	0	18
Kabupaten Situbondo	0	20	2	0	0	22
Kota Pasuruan	0	18	3	0	0	21
Kota Probolinggo	1	18	4	0	0	23
TOTAL	5	155	26	0	0	186
PERSENTASE	2,69%	83,33%	13,98%	0,00%	0,00%	100,00%

Sumber: Hasil data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas diperoleh informasi responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu terdapat 5 responden berpendidikan DIII (2,69%), 155 responden berpendidikan DIV/S1 (83,33%), 26 responden berpendidikan S2 (13,98%), dan responden yang berpendidikan S3 atau lainnya tidak ada (0,00%).

4.1.2.3 Responden Berdasarkan Usia

Data responden berdasarkan usia menunjukkan usia 26-30 tahun sebanyak 46 orang (24,73%), responden berusia 31-35 tahun sebanyak 47 orang (25,27%), responden berusia 36-40 tahun sebanyak 40 orang (21,51%), dan usia di atas 40 tahun (>40) sebanyak 53 responden (28,49%). Data responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Responden Berdasarkan Usia

Kabupaten/Kota	Usia (Tahun)				TOTAL
	26-30	31-35	36-40	>40	
Kabupaten Banyuwangi	3	7	2	6	18
Kabupaten Bondowoso	8	4	4	5	21
Kabupaten Jember	2	4	5	12	23
Kabupaten Lumajang	2	7	6	6	21
Kabupaten Pasuruan	7	5	3	4	19
Kabupaten Probolinggo	3	6	4	5	18
Kabupaten Situbondo	9	5	5	3	22
Kota Pasuruan	5	4	4	8	21
Kota Probolinggo	7	5	7	4	23
TOTAL	46	47	40	53	186
PERSENTASE	24,73%	25,27%	21,51%	28,49%	100,00%

Sumber: Hasil data diolah (2023)

4.1.2.4 Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja (Masa Kerja)

Data responden berdasarkan pengalaman kerja (masa kerja) menunjukkan pengalaman kerja 1-3 tahun sebanyak 55 orang (29,57%), pengalaman kerja 4-6 tahun sebanyak 43 orang (23,12%), pengalaman kerja 7-10 tahun sebanyak 27 orang (14,52%), dan pengalaman kerja (masa kerja) di atas 10 tahun (>10) sebanyak 61 orang (32,80%). Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5

Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja (Masa Kerja)

Kabupaten/Kota	Pengalaman Kerja / Masa Kerja (Tahun)				TOTAL
	1-3	4-6	7-10	>10	
Kabupaten Banyuwangi	4	6	2	6	18
Kabupaten Bondowoso	10	2	3	6	21
Kabupaten Jember	2	4	4	13	23
Kabupaten Lumajang	2	8	4	7	21
Kabupaten Pasuruan	7	6	1	5	19
Kabupaten Probolinggo	3	6	4	5	18
Kabupaten Situbondo	9	7	2	4	22
Kota Pasuruan	9	1	2	9	21
Kota Probolinggo	9	3	5	6	23
TOTAL	55	43	27	61	186
PERSENTASE	29,57%	23,12%	14,52%	32,80%	100,00%

Sumber: Hasil data diolah (2023)

4.2 Statistik Deskriptif Data

Statistik deskriptif memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian dengan melihat nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), dan standar deviasi. Penelitian ini membahas mengenai analisis statistik deskriptif yang dilakukan dari data 186 responden yang telah menjawab kuesioner secara lengkap. Hasil dari analisis statistik deskriptif terdapat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Data

Variabel	n	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
Akuntabilitas (X_1)	186	2,50	5,00	3,84	0,54
Komitmen Organisasi (X_2)	186	1,00	5,00	3,93	0,65
Kompetensi SDM (X_3)	186	1,00	5,00	3,79	0,72
Tekanan Eksternal (X_4)	186	3,00	5,00	4,13	0,51
Transparansi (X_5)	186	2,00	5,00	3,91	0,57
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	186	2,88	5,00	3,98	0,42

Sumber: Hasil data diolah (2023)

Berdasarkan data Tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah data pada setiap variabel adalah 186 data yang berasal dari sampel responden yang bekerja pada instansi pemerintahan bagian keuangan dan telah memenuhi kualifikasi dari sampel. Variabel akuntabilitas (X_1) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 2,50 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 5,00. Rata-rata dari variabel akuntabilitas (X_1) sebesar 3,84. Nilai standar deviasi dari variabel akuntabilitas (X_1) sebesar 0,54. Variabel komitmen organisasi (X_2) memiliki terendah (minimum) sebesar 1,00 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 5,00. Rata-rata dari variabel komitmen organisasi (X_2) sebesar 3,93. Nilai standar deviasi dari variabel komitmen organisasi (X_2) sebesar 0,65. Variabel kompetensi SDM (X_3) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 1,00 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 5,00. Rata-rata dari variabel kompetensi SDM (X_3) sebesar 3,79. Nilai standar deviasi dari variabel kompetensi SDM (X_3) sebesar 0,72. Variabel tekanan eksternal (X_4) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 3,00 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 5,00. Rata-rata dari tekanan eksternal (X_4) sebesar 4,13. Nilai standar deviasi dari variabel tekanan eksternal (X_4) sebesar 0,51.

Variabel transparansi (X_5) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 2,00 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 5,00. Rata-rata dari variabel transparansi (X_5) sebesar 3,91. Nilai standar deviasi dari variabel transparansi (X_5) sebesar 0,57. Sedangkan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 2,88 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 5,00. Rata-rata dari variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 3,98. Nilai standar deviasi dari variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,42.

4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan fakta (Ghozali, 2018). Uji validitas pearson correlation dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Suatu instrumen dikatakan valid jika nilai r pearson correlation terhadap skor total di atas 0,30 atau koefisien korelasi $> 0,30$ (Ghozali, 2018). Hasil uji validitas terdapat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r pearson correlation	Sig. (2-tailed)	Hasil
Akuntabilitas (X ₁)	X _{1.1}	0,679**	0,000	Valid
	X _{1.2}	0,742**	0,000	Valid
	X _{1.3}	0,778**	0,000	Valid
	X _{1.4}	0,750**	0,000	Valid
	X _{1.5}	0,723**	0,000	Valid
	X _{1.6}	0,739**	0,000	Valid
	X _{1.7}	0,685**	0,000	Valid
	X _{1.8}	0,543**	0,000	Valid
	X _{1.9}	0,520**	0,000	Valid
	X _{1.10}	0,439**	0,000	Valid
Komitmen Organisasi (X ₂)	X _{2.1}	0,801**	0,000	Valid
	X _{2.2}	0,813**	0,000	Valid
	X _{2.3}	0,805**	0,000	Valid
	X _{2.4}	0,766**	0,000	Valid
	X _{2.5}	0,817**	0,000	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X ₃)	X _{3.1}	0,791**	0,000	Valid
	X _{3.2}	0,806**	0,000	Valid
	X _{3.3}	0,770**	0,000	Valid
	X _{3.4}	0,766**	0,000	Valid
	X _{3.5}	0,792**	0,000	Valid
	X _{3.6}	0,782**	0,000	Valid
Tekanan Eksternal (X ₄)	X _{4.1}	0,725**	0,000	Valid
	X _{4.2}	0,711**	0,000	Valid
	X _{4.3}	0,797**	0,000	Valid
	X _{4.4}	0,619**	0,000	Valid
	X _{4.5}	0,724**	0,000	Valid
Transparansi (X ₅)	X _{5.1}	0,789**	0,000	Valid
	X _{5.2}	0,780**	0,000	Valid
	X _{5.3}	0,626**	0,000	Valid
	X _{5.4}	0,466**	0,000	Valid
	X _{5.5}	0,393**	0,000	Valid
	X _{5.6}	0,748**	0,000	Valid
	X _{5.7}	0,663**	0,000	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Y _{1.1}	0,606**	0,000	Valid
	Y _{1.2}	0,613**	0,000	Valid
	Y _{1.3}	0,658**	0,000	Valid
	Y _{1.4}	0,670**	0,000	Valid
	Y _{1.5}	0,599**	0,000	Valid

Variabel	Item	r pearson correlation	Sig. (2-tailed)	Hasil
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Y _{1.6}	0,562**	0,000	Valid
	Y _{1.7}	0,555**	0,000	Valid
	Y _{1.8}	0,552**	0,000	Valid
	Y _{1.9}	0,504**	0,000	Valid
	Y _{1.10}	0,465**	0,000	Valid
	Y _{1.11}	0,491**	0,000	Valid
	Y _{1.12}	0,565**	0,000	Valid
	Y _{1.13}	0,417**	0,000	Valid
	Y _{1.14}	0,336**	0,000	Valid
	Y _{1.15}	0,416**	0,000	Valid
	Y _{1.16}	0,375**	0,000	Valid

Sumber: Hasil data diolah (2023)

Berdasarkan uji validitas pada Tabel 4.7 di atas diperoleh hasil r pearson correlation terhadap skor total di atas 0,30, sehingga semua item pertanyaan kuesioner valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan fakta yang ada.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan metode cronbach alpha (α). Uji reliabilitas cronbach alpha (α) menggunakan alat bantu software IBM SPSS Statistics 25. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dapat dipercaya. Jika hasil perhitungan mendapatkan nilai cronbach alpha (α) lebih besar dari r tabel maka instrumen dinyatakan cukup reliabel (Sugiyono, 2020). Suatu instrumen dikatakan reliabel jika koefisien cronbach alpha (α) yang didapat lebih besar dari 0,70 atau $\alpha > 0,70$ (Ghozali, 2016). Berikut hasil uji reliabilitas terdapat pada Tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha (α)	Hasil
Akuntabilitas (X_1)	0,854	Reliabel
Komitmen Organisasi (X_2)	0,854	Reliabel
Kompetensi SDM (X_3)	0,867	Reliabel
Tekanan Eksternal (X_4)	0,756	Reliabel
Transparansi (X_5)	0,770	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,825	Reliabel

Sumber: Hasil data diolah (2023)

Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji reliabilitas. Dari data tersebut diperoleh variabel akuntabilitas, komitmen organisasi, kompetensi SDM, tekanan eksternal, transparansi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai koefisien cronbach alpha (α) lebih besar dari 0,70 yang berarti semua variabel reliabel sehingga kuesioner tersebut konsisten dan dapat dipercaya.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Asumsi normalitas dalam model regresi linear ditunjukkan oleh nilai error (ϵ) yang berdistribusi normal. Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program software IBM SPSS Statistics 25 digunakan untuk menguji normalitas data. Ghozali (2018) menyatakan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (asymptotic significance > 0,05) maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (asymptotic significance < 0,05) maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Berikut ini Tabel 4.9 hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 4.9

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

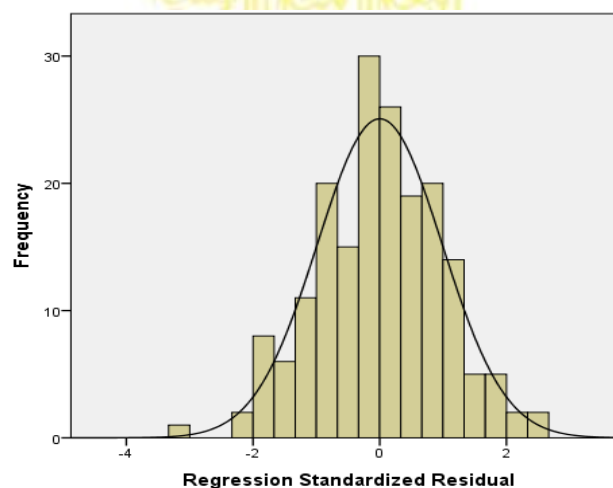
		Y
n (sampel)		186
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,97630
	Std. Deviation	0,42186
Most Extreme Differences	Absolute	0,089
	Positive	0,089
	Negative	-0,052
Kolmogorov-Smirnov Z		1,213
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,105

Sumber: Hasil data diolah (2023)

Tabel 4.9 di atas menunjukkan hasil asymptotic significance Sig. (2-tailed) sebesar 0,105. Dari data tersebut berarti data berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,105 > 0,05$). Tampilan histogram uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1

Histogram Uji Normalitas

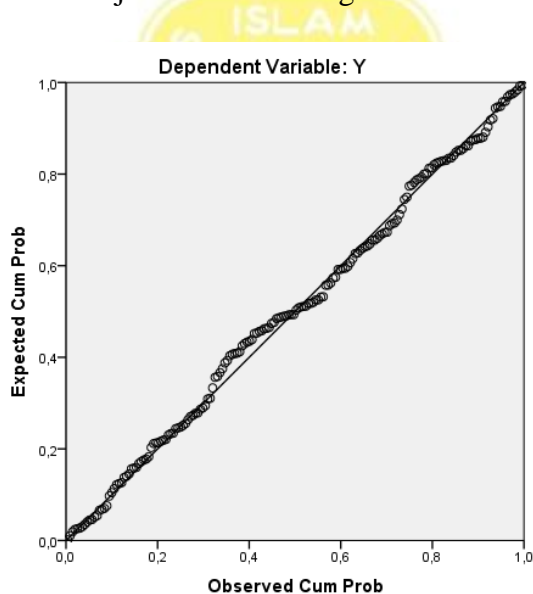


Sumber: Hasil data diolah (2023)

Berdasarkan tampilan histogram pada Gambar 4.1 di atas, grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya adalah data tersebut berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2017) apabila sebuah diagonal dari grafik terdapat adanya persebaran data (titik) yang mengikuti atau mendekati arah garis diagonal maka terdapat normalitas, namun apabila persebaran data (titik) menjauhi garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka tidak terdapat normalitas. Berikut ini Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan P-P Plot:

Gambar 4.2

Uji Normalitas dengan P-P Plot



Sumber: Hasil data diolah (2023)

Gambar 4.2 di atas menunjukkan Grafik Normal P-P Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kesimpulan dari pengujian Test of Normality Kolmogorov-Smirnov, Histogram, dan Grafik Normal P-P Plot di atas adalah data yang dipergunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat korelasi antar variabel independen (Hadi, 2012). Model regresi yang baik menurut Ghozali (2017) seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Model regresi yang normal menurut Ghozali (2017) yaitu memiliki nilai tolerance value lebih dari 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10,00 dan apabila nilai tolerance value kurang dari 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih dari 10,00 maka terjadi multikolinearitas. Berikut ini Tabel 4.10 hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 4.10

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Akuntabilitas (X_1)	0,872	1,147
Komitmen Organisasi (X_2)	0,980	1,020
Kompetensi SDM (X_3)	0,930	1,075
Tekanan Eksternal (X_4)	0,878	1,139
Transparansi (X_5)	0,927	1,079

Sumber: Hasil data diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4.10 di atas diketahui bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai tolerance sebesar 0,872 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,147 kurang dari 10,00. Variabel komitmen organisasi memiliki nilai tolerance sebesar 0,980 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,020 kurang dari 10,00. Variabel kompetensi SDM memiliki nilai tolerance sebesar 0,930 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,075 kurang dari 10,00. Variabel tekanan

eksternal memiliki nilai tolerance sebesar 0,878 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,139 kurang dari 10,00. Variabel transparansi memiliki nilai tolerance sebesar 0,927 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,079 kurang dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan model regresi normal (tidak terjadi korelasi) karena tidak terjadi multikolinearitas.

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

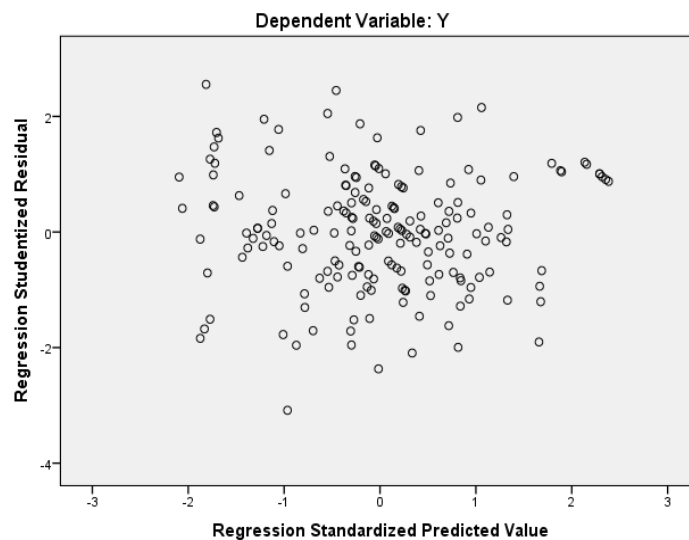
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan varian dan nilai residu pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2017). Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik scatterplot dan uji glejser. Uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplots menurut Ghozali (2017) adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi heteroskedastisitas apabila terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur.
- b. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak terdapat pola yang membentuk pola tertentu dan teratur, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Berikut ini Gambar 4.3 hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot:

Gambar 4.3

Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot



Sumber: Hasil data diolah (2023)

Dari Gambar 4.3 grafik scatterplot diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik tidak terdapat pola yang jelas (tidak berpola). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi baik.

Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (Sugiyono, 2020). Menurut Ghozali (2017), apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut

residualnya kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas) (Hadi, 2012).

Berikut ini Tabel 4.11 hasil uji glejser:

Tabel 4.11

Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,314	0,162		1,944	0,053
1 Akuntabilitas (X_1)	-0,020	0,023	-0,068	-0,854	0,394
Komitmen Organisasi (X_2)	-0,006	0,018	-0,025	-0,334	0,738
Kompetensi SDM (X_3)	0,011	0,017	0,049	0,633	0,528
Tekanan Eksternal (X_4)	-0,002	0,024	-0,006	-0,081	0,936
Transparansi (X_5)	-0,013	0,021	-0,048	-0,625	0,533

Sumber: Hasil data diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4.11 di atas diketahui bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,394 lebih besar dari 0,05. Variabel komitmen organisasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,738 lebih besar dari 0,05. Variabel kompetensi SDM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,528 lebih besar dari 0,05. Variabel tekanan eksternal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,936 lebih besar dari 0,05. Variabel transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,533 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut baik karena tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas (X_1), komitmen organisasi (X_2), kompetensi SDM (X_3), tekanan eksternal (X_4), dan transparansi (X_5) terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah (Y). Hasil perhitungan regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,128	0,261		4,325	0,000
1 Akuntabilitas (X ₁)	0,570	0,037	0,735	15,461	0,000
Komitmen Organisasi (X ₂)	0,001	0,029	0,001	0,022	0,982
Kompetensi SDM (X ₃)	0,013	0,027	0,021	0,463	0,644
Tekanan Eksternal (X ₄)	0,141	0,039	0,170	3,590	0,000
Transparansi (X ₅)	0,008	0,034	0,011	0,236	0,813

Sumber: Hasil data diolah (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.12 maka model regresi linear berganda pada penelitian ini ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$Y = 1,128 + 0,570X_1 + 0,001X_2 + 0,013X_3 + 0,141X_4 + 0,008X_5$$

Keterangan:

- Y = kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- X₁ = akuntabilitas
- X₂ = komitmen organisasi
- X₃ = kompetensi SDM
- X₄ = tekanan eksternal
- X₅ = transparansi

Interpretasi dari persamaan regresi Linear berganda di atas sebagai berikut:

1. Jika semua variabel independen memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 1,128.

2. Nilai koefisien akuntabilitas untuk variabel X_1 sebesar 0,570. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel akuntabilitas satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,570 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap.
3. Nilai koefisien komitmen organisasi untuk variabel X_2 sebesar 0,001. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel komitmen organisasi satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,001 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap.
4. Nilai koefisien kompetensi SDM untuk variabel X_3 sebesar 0,013. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel kompetensi SDM satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,013 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap.
5. Nilai koefisien tekanan eksternal pajak untuk variabel X_4 sebesar 0,141. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel tekanan eksternal satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,141 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap.
6. Nilai koefisien transparansi untuk variabel X_5 sebesar 0,008. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel transparansi satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,008 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap.

4.6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menurut Sugiyono (2016) dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar pengaruh kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) hanya antara 0-1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin kecil nilai koefisien determinasi (R^2) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah Adjusted R Square (Ghozali, 2018). Berikut Tabel 4.13 hasil analisis koefisien determinasi:

Tabel 4.13

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,803	0,645	0,635	0,25481

Sumber: Hasil data diolah (2023)

Berdasarkan analisis di atas, nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,635. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,635 berarti akuntabilitas, komitmen organisasi, kompetensi SDM, tekanan eksternal, dan transparansi memiliki pengaruh sebesar 63,50% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya 36,50% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi pada penelitian ini (variabel lain yang tidak diteliti). Nilai koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati 1 (satu) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat (Sugiyono, 2020).

4.7 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Menurut Hadi (2012) tujuan dari uji parsial (uji t) adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Uji t (parsial) pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel akuntabilitas, komitmen organisasi, kompetensi SDM, tekanan eksternal, dan transparansi secara parsial (sendiri) berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) terdapat pada Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14

Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,128	0,261		4,325	0,000
1 Akuntabilitas (X ₁)	0,570	0,037	0,735	15,461	0,000
Komitmen Organisasi (X ₂)	0,001	0,029	0,001	0,022	0,982
Kompetensi SDM (X ₃)	0,013	0,027	0,021	0,463	0,644
Tekanan Eksternal (X ₄)	0,141	0,039	0,170	3,590	0,000
Transparansi (X ₅)	0,008	0,034	0,011	0,236	0,813

Sumber: Hasil data diolah (2023)

Tabel 4.14 di atas menunjukkan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar $15,461 > t$ tabel $2,2603$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar $0,022 < t$ tabel $2,2603$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0,982 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar $0,463 < t$ tabel $2,2603$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0,644 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya kompetensi SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar $3,590 > t$ tabel $2,2603$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar $0,236 < t$ tabel $2,2603$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0,813 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.8 Pembahasan

- 4.8.1 Pengaruh antara akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Teori institusional atau teori kelembagaan menurut Midin et al. (2016) merupakan peristiwa di mana lingkungan institusional atau kelembagaan dapat memengaruhi perkembangan struktur formal dalam sebuah organisasi. Pada penelitian ini, isomorfisme koersif merupakan pendorong utama yang terjadi karena adanya desakan formal yang memaksa Pemerintah Daerah untuk mematuhi dan mengimplementasikan Peraturan atau Undang-Undang untuk dapat meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, akuntabilitas juga termasuk ke dalam isomorfisme

normatif (normative) karena dalam proses pertanggungjawaban keuangan organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai β_1 untuk variabel akuntabilitas (X_1) sebesar 0,570 yang berarti setiap kenaikan variabel akuntabilitas satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,570 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar $15,461 > t$ tabel $2,2603$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0,000 < 0,05$ dengan level of significant sebesar 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyanti (2017), Hamsinar (2017), Tahir et al. (2020), dan Wibowo (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sejalan dengan teori keagenan (agency theory) di mana akuntabilitas dapat menciptakan hubungan keagenan antara Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai agen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertindak sebagai wakil dari prinsipal (Redjo, 2018). Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan atau undang-undang. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang dapat dipertanggungjawaban oleh

pihak yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat atau individu atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas untuk memperoleh tujuan yang ditetapkan (Hamsinar, 2017). Iyoha dan Oyerinde (2010) mengatakan bahwa akuntabilitas mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan terkait dengan sumber dan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya publik. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Mursyidi, 2013). Akuntabilitas publik melibatkan berbagai mekanisme yang tersedia untuk menjelaskan kebijakan dan kegiatan organisasi untuk berkomunikasi kepada pejabat pemerintah dengan mudah dan langsung melalui dengar pendapat publik, media massa, atau bahkan melalui alat komunikasi real time (Ahyaruddin dan Akbar, 2017).

Riyanti (2017) menjelaskan peningkatan nilai relevansi kualitas laporan keuangan disebabkan oleh pencatatan pengelolaan anggaran yang akuntabel di dalam laporan. Nilai pertanggungjawaban pihak instansi yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan akan berdampak terhadap semakin tingginya nilai reliabilitas atau keandalan laporan keuangan. Analisis keuangan yang tinggi pada setiap kegiatan atau program yang telah selesai dilaksanakan.berdampak akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mampu dibandingkan nilainya dengan laporan-laporan keuangan yang telah disusun sebelumnya. Upaya tindak lanjut berupa evaluasi oleh pihak instansi akan berdampak terhadap peningkatan nilai kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disusun menjadi lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak berkepentingan.

4.8.2 Pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa isomorfisme normatif (normative) terjadi ketika organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi. Sejalan dengan isomorfisme institusional, komitmen organisasi secara normatif merupakan bentuk dari perjuangan kolektif anggota organisasi dalam menentukan kondisi dan metode kerja agar tercapai profesionalisme (Sofyani dan Akbar, 2013). Pejabat pemerintahan yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimilikinya untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat (Mutiana et. al., 2017). Manajemen dalam menjalankan komitmen harus dapat mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan agar organisasi dapat sukses dalam jangka panjang.

New Public Management (NPM) menurut Mardiasmo, (2018) merupakan sebuah konsep perubahan manajemen sektor publik yang awalnya terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi fleksibel dan dapat mengakomodasi pasar. Konsep perubahan manajemen salah satunya dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Manajemen dalam menjalankan komitmen organisasi harus mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan agar organisasi dapat sukses dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah kesiapan, koordinasi seluruh pegawai untuk melaksanakan peran serta kewenangan masing-masing, dan komitmen yang kuat oleh seluruh pihak dalam suatu organisasi. Jika komitmen organisasi telah terbangun, maka akan mendukung tercapainya tujuan (Irfani et al., 2020).

Komitmen organisasi merupakan proses yang penting dalam mendesain, mengimplementasikan, dan menggunakan sistem pengukuran kinerja (Sofyani dan Akbar, 2013). Komitmen terhadap organisasi bukan hanya sekedar keanggotaan formal karena manajemen harus memiliki sikap menyukai organisasi dan bersedia untuk mengusahakan kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan organisasi. Setiap pekerja akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dengan adanya komitmen (Mutiana et al., 2017). Mereka akan termotivasi melaporkan segala aktivitasnya termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai β_2 untuk variabel komitmen organisasi (X_2) sebesar 0,001. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel komitmen organisasi satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,001 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar $0,022 < t$ tabel 2,2603 dan nilai signifikansi (Sig.) $0,982 > 0,05$ dengan level of significant sebesar 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maksyur (2015), Mutiana et al. (2017), Nugroho (2018), dan Nugroho dan Setyowati (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Tampubolon dan Hasibuan, (2019) dan Hernanda (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kemungkinan dikarenakan beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV memiliki suatu kebijakan dan peraturan terkait kinerja akan tetapi tidak selamanya dapat dijalankan dengan baik oleh pelaku organisasi. Komitmen tinggi yang dimiliki oleh pegawai di pemerintahan menjelaskan adanya keterkaitan diri organisasi dan tujuan-tujuan yang ingin di capai, serta mempertahankan keanggotaannya dalam tempatnya bekerja. Sebagai pegawai pemerintah, sudah sewajarnya pejabat struktural SKPD memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi tempatnya bekerja. Hal ini dikarenakan lamanya bekerja pada instansi tersebut membuat pejabat struktural SKPD tersebut semakin terikat dan peduli terhadap organisasi. Namun pada kenyataannya tergambar adanya hubungan yang kaku antara bawahan dan atasan yang kurang komunikatif. Dampaknya adalah permasalahan tersebut terpendam di ranah bawah, dan atasan terkesan menekan bawahan dengan target-target dan berbagai tugas sehingga pegawai tidak nyaman dalam bekerja dan mengurangi motivasi kerja mereka sehingga pemenuhan kewajiban atas penyajian laporan keuangan masih kurang dalam pemenuhannya.

4.8.3 Pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam penilaian profesionalisme. DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa isomorfisme normatif terkait dengan profesionalisme. Profesionalisme merupakan suatu hal yang terkait dengan integritas dan kompetensi sumber daya manusia di organisasi atau instansi itu sendiri (Ferdian, 2014). Sumber daya manusia menurut Zhou (2010) merupakan faktor penentu dalam perkembangan informasi akuntansi sehingga kualitas profesional sumber daya manusia harus ditingkatkan agar pemerintah daerah dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Penerapan New Public Management merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui rekrutmen pegawai berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis akuntansi (Irfani et al., 2020). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku seorang Pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sumber daya manusia yang kompeten diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Seiring dengan perubahan yang terjadi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya kinerja pelaksanaan pemerintahan (Mutiana et. al., 2017).

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai β_3 untuk variabel kompetensi SDM (X_3) sebesar 0,013. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel kompetensi SDM satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,013 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar $0,463 < t \text{ tabel } 2,2603$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0,644 > 0,05$ dengan level of significant sebesar 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya kompetensi SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merantika dan Heriyanto (2017), Nugroho (2018), dan Tampubolon dan Hasibuan (2019) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014), Wijayanti dan Handayani (2017), dan Wibowo (2022) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut informasi yang peneliti dapatkan selama proses penelitian hasil ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi kompetensi sumber daya manusia yang ada pada SKPD di beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV di bagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang belum mendukung, di mana masih banyak karyawan di bidang keuangan/tata usaha tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai adalah Ilmu Ekonomi dan Manajemen bahkan beberapa diantaranya

ada yang dari luar lingkup Ekonomi dan Bisnis. Meskipun demikian, pemerintah telah berusaha memberikan suatu sistem yang mendukung untuk mempermudah pekerjaan bagian akuntansi dengan menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), penyelenggaraan seminar ataupun diklat keuangan, dan pelatihan ketatausahaan sehingga diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan tetap memiliki kualifikasi berdasarkan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yaitu andal, relevan, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Kemungkinan lain kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pegawai yang berkompeten ataupun tidak berkompeten dianggap memiliki kompetensi yang sama dalam mengelola laporan keuangan. Hal ini bisa berdampak pada kinerja pegawai. Pegawai yang kompeten ataupun rendah kompetensinya dalam mengelola laporan keuangan sebelum melakukan pengelolaan tentunya diberikan sebuah pelatihan mengenai cara menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar yang berlaku sehingga dapat mengelola keuangan dan menyiapkan laporan keuangan dengan baik (Putri dan Akbar, 2020). Namun cara tersebut belum tentu efektif dikarenakan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut berbeda-beda. Disiplin kerja merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia karena dapat meminimalisasi kesalahan, penyimpangan, atau kelalaian agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

4.8.4 Pengaruh antara tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Lingkungan kelembagaan memiliki kekuatan dalam proses institusionalisasi karena organisasi memiliki ketergantungan yang tinggi dengan lingkungan kelembagaannya sehingga melahirkan aturan, nilai, dan praktik baru yang menjadi bagian dari organisasi (Mariandini et al., 2018). Teori institusional berkaitan dengan bagaimana organisasi menyusun diri mereka sendiri dan mendapatkan penerimaan dan legitimasi yang mungkin mengorbankan efisiensi. Organisasi bukan hanya berkompetisi untuk memperoleh sumber daya dan customer tetapi juga mendapatkan kekuatan politik, legitimasi institusi, dan untuk kepentingan sosial (Kisworo dan Shauki, 2019). Tekanan eksternal dikategorikan ke dalam isomorfisme koersif menurut DiMaggio dan Powell (1983) karena kebijakan tertentu diadopsi oleh tekanan atau kekuatan yang memaksa. Sofyani dan Akbar (2015) menyatakan isomorfisme koersif merupakan hasil dari tekanan formal maupun informal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai β_4 untuk variabel tekanan eksternal (X_4) sebesar 0,141. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel tekanan eksternal satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,141 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar $3,590 > t$ tabel $2,2603$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0,000 < 0,05$ dengan level of significant sebesar 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0

ditolak dan H_1 diterima, yang artinya tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merantika dan Heriyanto (2017), Lubis (2017), dan Winarni dan Akbar (2020) menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Merantika dan Heriyanto (2017) mengatakan perubahan yang terjadi dalam organisasi terpengaruh oleh adanya faktor politik. Peningkatan kualitas laporan keuangan hanya akan bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi. Tekanan eksternal membuat seluruh anggota organisasi melaksanakan proses kegiatan operasional dengan semestinya dan proses tersebut dilakukan dengan lebih terbuka. Sebagai contoh seperti menggunakan tenaga auditor eksternal yang bersifat independen. Apabila proses tersebut berhasil dilaksanakan, tentu kualitas pelaporan keuangan mengalami peningkatan (Noprizal, 2017).

Tekanan eksternal berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar pemerintahan yang sedang berjalan. Salah satu contoh adanya regulasi/ peraturan yang secara formal diberlakukan untuk menyusun struktur institusi pemerintah agar berperilaku dengan cara tertentu. Tekanan eksternal merupakan dorongan atau penolakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang berasal dari luar organisasi maupun pemerintah dalam bentuk peraturan atau tatanan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Tekanan eksternal yang sangat berpengaruh adalah tekanan yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik.

4.8.5 Pengaruh antara transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Perspektif teori kelembagaan menggambarkan struktur organisasi di mana organisasi menerima sesuatu yang sesuai dengan kode etik budaya, yang kemudian mengarah pada legitimasi dan dukungan dari organisasi eksternal (DiMaggio dan Powell, 1983; Ahyaruddin dan Akbar, 2017; Surachman dan Astuti, 2020). Kepercayaan masyarakat akan meningkat seiring dengan adanya transparansi dari pemerintah, hal ini dikarenakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat. Pemerintah membutuhkan kepercayaan dari masyarakat sebagai modal yang penting untuk jalannya pemerintahan. Dukungan pemerintah lahir dalam menjalankan program-programnya dikarenakan peningkatan kepercayaan dari masyarakat (Kusuma, 2012). Hamsinar (2017) menjelaskan lebih lanjut mengenai transparansi dan keterbukaan dapat menciptakan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi termasuk ke dalam isomorfisme normatif. Isomorfisme normatif terjadi ketika organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi (DiMaggio dan Powell, 1983). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang materiil dan relevan. Proses pengambilan keputusan dan keterbukaan pemerintah tentunya mengadopsi nilai dan organisasi lain dalam pelaksanaannya sebagai hasil

dari profesionalisasi. Nilai dan prinsip kepatuhan merupakan suatu hal yang harus dipegang dan dilakukan dalam mengelola keuangan organisasi agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkat (Putra, 2016).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai β_5 untuk variabel transparansi (X_5) sebesar 0,008. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel transparansi satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,008 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar $0,236 < t \text{ tabel } 2,2603$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0,813 > 0,05$ dengan level of significant sebesar 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merialsa (2017), Maulana dan Lubis (2020), dan Wibowo (2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyanti (2017), Septiningtyas (2017), Suryani (2021), dan Putri dan Akbar (2022) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kepercayaan masyarakat akan meningkat seiring dengan adanya transparansi dari pemerintah, hal ini dikarenakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat. Pemerintah membutuhkan kepercayaan dari masyarakat sebagai modal yang penting untuk jalannya

pemerintahan. Namun fakta di lapangan ditemukan beberapa SKPD belum menyediakan informasi terbaru secara berkala mengenai laporan keuangan yang menyebabkan masyarakat kurang memahami dan tidak dapat mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dijalankan apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Menurut Hamsinar (2017), rendahnya tingkat transparansi diakibatkan karena kurangnya sosialisasi peraturan dan kebijakan pemerintah khususnya sektor keuangan sehingga terjadi peningkatan pelanggaran hukum karena masyarakat tidak mengetahui berbagai peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut yang menyebabkan kemungkinan transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu kemungkinan lain yang menyebabkan transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah belum memberikan semua informasi atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kepada masyarakat atau publik. Alasannya adalah karena hal tertentu yang terjadi di pemerintah daerah yang tidak atau belum bisa untuk diungkapkan kepada publik atau masyarakat. Transparansi seharusnya memiliki makna bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan memadai sehingga memberikan informasi yang lengkap dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dengan mudah. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah pada tingkat SKPD belum memberikan informasi yang memadai dan belum mempublikasikan pada situs atau website instansi yang mudah untuk diakses oleh masyarakat ataupun pihak yang berkepentingan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Akuntabilitas, komitmen organisasi, kompetensi SDM, tekanan eksternal, dan transparansi memiliki pengaruh sebesar 63,50% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya 36,50% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi pada penelitian ini (variabel lain yang tidak diteliti).
2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi nilai akuntabilitas di dalam laporan keuangan daerah akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Sebagai contoh, peningkatan nilai pertanggungjawaban pihak instansi dalam menyusun laporan keuangan akan berdampak terhadap semakin tingginya nilai reliabilitas atau keandalan laporan keuangan.
3. Komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, naik turunnya komitmen organisasi tidak akan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Kemungkinan komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan adalah komitmen yang dilakukan bersifat normatif sedangkan komitmen yang berkaitan dengan

pemenuhan kewajiban atas penyajian laporan keuangan masih kurang dalam pemenuhannya.

4. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, naik turunnya kompetensi sumber daya manusia tidak akan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Kemungkinan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pegawai yang berkompoten ataupun tidak berkompoten dianggap memiliki kompetensi yang sama dalam mengelola laporan keuangan.
5. Tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi tekanan eksternal akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Tekanan eksternal merupakan dorongan atau penolakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang berasal dari luar organisasi maupun pemerintah dalam bentuk peraturan atau tatanan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik.
6. Transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, naik turunnya transparansi tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. Transparansi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, pemerintah daerah pada tingkat SKPD belum memberikan informasi mengenai laporan keuangan yang

memadai dan belum mempublikasikan pada situs atau website instansi yang mudah untuk diakses.

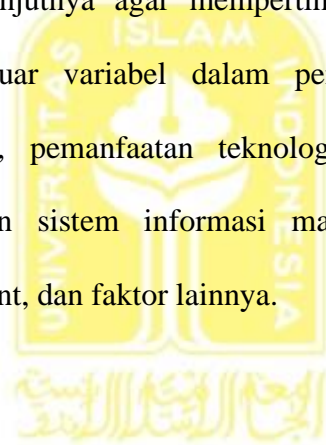
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kantor/ instansi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
2. Seluruh pegawai pada kantor/ instansi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV untuk lebih meningkatkan hubungan yang luwes antara bawahan dan atasan agar lebih komunikatif tujuannya agar seluruh pegawai lebih termotivasi untuk bekerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Selain itu peningkatan sumber daya manusia juga lebih digalakkan dengan menjalankan program seminar, pelatihan, kursus, pendidikan, dan penghargaan sehingga diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan tetap memiliki kualifikasi berdasarkan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
3. Seluruh pegawai pada kantor/ instansi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV untuk lebih meningkatkan kedisiplinan. Disiplin kerja merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia karena dapat meminimalisasi kesalahan,

penyimpangan, atau kelalaian agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

4. Seluruh kantor/ instansi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV untuk lebih menyediakan informasi terbaru, berkala, dan mudah diakses mengenai laporan keuangan sehingga masyarakat atau pihak yang membutuhkan dapat memahami dan ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dijalankan sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan dapat meningkat.
5. Untuk penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan variabel prediktor potensial lainnya diluar variabel dalam penelitian ini, seperti sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, ketidakpastian lingkungan, penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah, penerapan e-government, dan faktor lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., dan Akbar, R. (2016). The Relationship Between the Use of a Performance Measurement System, Organizational Factors, Accountability, and the Performance of Public Sector Organizations. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(1), 1. Sumber: <https://doi.org/10.22146/jieb.10317>
- _____. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: Semu atau nyata? *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 21(2), 106–117. Sumber: <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3>
- Akbar, R., Pilcher, R. A., dan Perrin, B. (2015). Implementing performance measurement systems: Indonesian local government under pressure. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 12(1), 3–33. Sumber: <https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2013-0013>
- Anthony, R. N., dan Govindarajan, V. (2016). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin, J. (2014). *Isomorphic Pressures Influencing the Level of Mandatory Disclosure within Financial Statements of Indonesian Local Governments*. Desertasi, Curtin University.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asroel, R., Basri, Y., dan Susilatri, S. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 867–880.
- BPK RI. (2020). *BPK: Seluruh Pemerintah Provinsi Capai Opini WTP*. Sumber: <https://www.bpk.go.id/news/bpk-seluruh-pemerintah-provinsi-capai-opini-wtp> (Diakses pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.00 dengan pengubahan)
- _____. *IHPS I Tahun 2020 (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020)*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Budiawan, D. A., dan Purnomo, B. S. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276–288.
- Chodijah, S., dan Hidayah, N. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal TEKUN*, 8(1), 34–48.

- Christian, H. Y., dan Sutaryo. (2015). Penentu Jumlah Internal Control Compliance Comment dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 11(2), 138–146.
- DiMaggio, P. J., dan Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147. Sumber: <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Ferdian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–18.
- Fitrianto, F. F. (2015). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kebumen). Artikel, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, I. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- _____. (2017). *Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goddard, A., Assad, M., Issa, S., Malagila, J., dan Mkasiwa, T. A. (2016). The 'Two Publics' and Institutional theory— A Study of Public Sector Accounting in Tanzania. *Critical Perspectives on Accounting*, 40(X), 8–25. Sumber: <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.02.002>
- Hadi, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hafsari, P. (2020). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Hamsinar. (2017). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Harahap, S. S. (2012). *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Depok: Rajawali Pers.

- Hernanda, L. T. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran, dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(02), 247–266.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(2), 1–20.
- Imam, M. A. (2017). Peran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengambilan Kebijakan Desentralisasi Fiskal. Sumber: <https://bpkad.bekasikota.go.id/2017/04/27/peran-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-dalam-pengambilan-kebijakan-desentralisasi-fiskal/> (Diakses pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 19.00 dengan pengubahan).
- Irfani, M., Pituringsih, E., dan Husnan, L. H. (2020). Determinan Keberhasilan Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1522–1538. Sumber: <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p14>
- Iyoha, F., dan Oyerinde, D. (2010). Accounting infrastructure and accountability in the management of public expenditure in developing countries: A focus on Nigeria. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(5), 361–373.
- Khubiyati, A., dan Arifin, J. (2016). Analisis Pengaruh Faktor Institusional Terhadap Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*. Lampung.
- Kisworo, J., dan Shauki, E. R. (2019). Teori Institusional dalam Penyusunan dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia). *Indonesian Treasury Review*, 4(4), 305–321.
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Cahaya Aktiva*, 02(02), 1–13.
- Lubis, N. K. (2017). Faktor Faktor yang Memengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *JURNAL PENELITIAN EKONOMI AKUNTANSI (JENSI)*, 1(2), 124–136.
- Lynda. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Aset*, 2(2), 18–38.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi 3)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Maksyur, N. V. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM. FEKON*, 2(2), 1–15.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mariandini, F. I., Irianto, G., dan Nurkholis. (2018). Institutionalalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Economia*, 14(1).
- Marsdenia, dan Arthaingan, M. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: sebuah Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Bogor. *Journal of Vocational Program University of Indonesia*, 4(2), 66–92.
- Marwansyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Alfa Beta.
- Maulana, Z., dan Lubis, N. K. (2020). Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *JURNAL PENELITIAN EKONOMI AKUNTANSI (JENSI)*, 4(1), 1–14.
- Merantika, R., dan Heriyanto, R. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Tekanan Eksternal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 12(2), 24–51.
- Merialsa, A. I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Inspektorat dan BPKAD Kota Bandung). Skripsi, Universitas Pasundan Bandung.
- Midin, M., Joseph, C., dan Mohamad, N. (2016). Advancing Sustainable Development in the Public Sector via Stakeholders ' Engagement Disclosure Website. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 224(August 2015), 93–100. Sumber: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.408>
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mutiana, L., Diantimala, Y., dan Zuraida, Z. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satker di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 151–167. Sumber: <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8228>

- Nalukenge, I., Nkundabanyanga, S. K., dan Tauringana, V. (2012). "Literacy, External User-Pressure and Quality of Accounting Information of Ugandan SMEs", Tauringana, V. and Mangena, M. (Ed.) *Accounting in Africa (Research in Accounting in Emerging Economies, Vol. 12 Part A)*. (V. Tauringana dan M. Mangena, Eds.) (12A ed.). Emerald Group Publishing Limited. Sumber: [https://doi.org/10.1108/S1479-3563\(2012\)000012A007](https://doi.org/10.1108/S1479-3563(2012)000012A007)
- Noprizal, R. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Sistem Pengendalian Pemerintah terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, 4(1), 1066–1080.
- Nugroho, B. S. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nugroho, F. A., dan Setyowati, W. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasional, Sistem Informasi Akuntansi, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 125–134. Sumber: <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.45>
- Nurdin, N., Stockdale, R., dan Scheepers, H. (2012). The influence of external institutional pressures on local e-government adoption and implementation: A coercive perspective within an Indonesian local e-government context. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 7443 LNCS, 13–26. Sumber: https://doi.org/10.1007/978-3-642-33489-4_2
- Olesson, E., Albert, E., Coroneos, R., Leeson, R., dan Wyatt, R. (2012). *Options for a Local Government Framework for Measuring Liveability*. Australian Centre of Excellence for Local Government. Sydney.
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pujanira, P., dan Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, VI(2), 14–28. Sumber: <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>

Putra, B. M. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Putri, A. C. P., dan Akbar, F. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 14–25. Sumber: <https://doi.org/doi.org/10.31955/mea.v6i2.1994>

Putri, U. A., Hafidhah, dan Firmansyah, I. D. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kabupaten Sumenep. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1(1), 11–19. Sumber: <https://doi.org/doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1202>

Redjo, P. R. D. (2018). Efek Moderasi Pada Pengaruh Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 1–18.

Ridha, M. A., dan Basuki, H. (2012). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. Banjarmasin.*

Riyanti, F. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sambuaga, F. R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi*, 5(1), 105–124.

- Santoso, S. (2020). *Panduan Lengkap SPSS 26*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Savitri, R. A., dan Fanani, Z. (2017). The Institutionalization of Accrual Accounting: The Perspective of New Institutional Sociology Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 100–109. Sumber: <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.10618>
- Septiani, M. (2020). Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik. Sumber: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 19.00 dengan perubahan).
- Septiningtyas, Tika. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Serikat Pekerja Nasional. (2020). Pentingnya Transparansi Keuangan. Sumber: <https://spn.or.id/pentingnya-transparansi-keuangan/> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 19.15 dengan perubahan).
- Setyowati, L., Isthika, W., dan Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *KINERJA*, 20(2), 179–191. Sumber: <https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i2.843>
- Sihaloho, J., Surya, R. A. S., dan Supriono. (2013). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). *JOM. FEKON*, 1(1), 1–15.
- Sofyani, H., dan Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 184–205.
- _____. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, 19(2), 153–173. Sumber: <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art6>
- Suddaby, R. (2010). Challenges for Institutional Theory. *Journal of Management Inquiry*, 19(1), 14–20. Sumber: <https://doi.org/10.1177/1056492609347564>
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., dan Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan (pp. 1–25). Medan.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Sutopo, Ed.) (Kedua). Bandung: CV Alfabeta.

Surachman, E. N., dan Astuti, R. D. (2020). An Analysis of Village Fund Implementation in Central Java Province: An Institutional Theory Approach with A Modelling Institutional Aspect. *Indonesian Treasury Review*, 5(3), 203–215.

Surastiani, D. P., dan Handayani, B. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 139–149. Sumber: <https://doi.org/10.15294/jda.v7i2.4124>

Suryani, A. T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi diintervening Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes. Skripsi, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.

Syahril, Mandani, A. R., dan Firmansyah, I. D. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Desa di Kecamatan Kalianget Timur Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 65–80. Sumber: <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p65-80>

Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*, 14(02), 26–44. Sumber: <https://doi.org/doi.org/10.32639/fokusbisnis.v13i2.22>

Tahir, S. Y., Malia, E., dan Faisol, I. A. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, dan Transparansi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 1(I), 20–29. Sumber: <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>

Tampubolon, F. M., dan Hasibuan, A. B. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 55–65. Sumber: <https://doi.org/10.23969/oikos.v3i1.1415>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wibowo. (2017). *Perilaku dalam Organisasi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Wibowo, Felicia. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wijayanti, R., dan Handayani, N. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1290–1307.

Winarni, D., dan Akbar, R. (2020). Faktor Tekanan Institusional dalam Memengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi: Pendekatan Metoda Campuran. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 1–11.

Winarti, K. A. T., dan Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal , Pengendalian Internal , Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 747–774. Sumber: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p27>

Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada DPKAD se-Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–24.

Yuliani, S., Nadirsyah, dan Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 206–220.

Zhou, L. (2010). The Research on Issue and Countermeasures of Accounting Information of SMES. *International Journal of Business and Management*, 5(3), 223–225. Sumber: <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n3p223>

<https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-pemerintahdaerah/> diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 19.00 dengan perubahan.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

7 Maret 2022

Nomor : 270/PS.II.B.3/III/2022
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikannya di Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah berupa tesis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seorang mahasiswa kami:

Nama : Rizal Giri Laksono
No. Mhs. : 19919017
Program Studi : Magister Akuntansi
No. HP. : 0821 3396 0340
Judul Tesis : "Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV)"

bermaksud mohon ijin untuk melakukan penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tugas akhir/tesis.

Adapun hasil karya ilmiah ini semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan. Oleh karena itu, kami mohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.



Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dr. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦢꦫꦺꦃꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠ
 ꦢꦶꦤꦱꦸꦫꦶꦤꦠꦺꦤꦤꦺꦩꦤꦏꦺꦩꦠ

Jalan Janti No. 8 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta – 55198
 Telepon: (0274) 453 8737, Faksimile: (0274) 552 521
 Situs Web: <http://jogjainvest.jogjaprov.go.id>, Surel: dppm@jogjaprov.go.id

Nomor : 070/01721/P2/2022 Yogyakarta, 12 April 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth.

Rizal Giri Laksono
 Bedahan Kulon RT 002 RW 001
 Kelurahan Mirit, Kecamatan Mirit,
 Kabupaten Kebumen
 di -

JAWA TENGAH

Menjawab surat permohonan Pemberitahuan Surat Keterangan Penelitian dari Saudara Rizal Giri Laksono dengan nomor: 001/PS.KP/IV/2022 tanggal 04 April 2022, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. penelitian dengan Judul **“Determinan Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV)”** adalah untuk tugas akhir berupa tesis;
2. berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, surat keterangan penelitian **dikecualikan** terhadap penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri;
3. lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa Timur, sehingga peneliti dapat langsung melakukan penelitian dengan menunjukkan Surat Izin Penelitian dari Universitas.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
 Sekretaris Dinas

 Sunu Siswanta, SE
 NIP. 19640426 199303 1 002



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

Nomor : 270/PS.II.B.3/III/2022

7 Maret 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur
di Jawa Timur

Assalaamu 'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikannya di Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah berupa tesis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seorang mahasiswa kami:

Nama : Rizal Giri Laksono
No. Mhs. : 19919017
Program Studi : Magister Akuntansi
No. HP. : 0821 3396 0340
Judul Tesis : "Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV)"

bermaksud mohon ijin untuk melakukan penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tugas akhir/tesis.

Adapun hasil karya ilmiah ini semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan. Oleh karena itu, kami mohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr. wb.

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS), Ph.D



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493
 SURABAYA – (60189)

Surabaya, 19 April 2022

Nomor : 070/3780/209.4/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian/Survey/Research

K e p a d a
 Yth. Bupati/ Walikota Daftar Terlampir
 di - TEMPAT

Menunjuk surat : Ketua Program Studi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
 Nomor : 270/PS.II.B.3/III/2022
 Tanggal : 07 Maret 2022

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RIZAL GIRI LAKSONO
 Alamat / No. Telp : Bedahan Kulon Rt.02/Rw.01, Mirit, Kebumen/ 082133960340
 Pekerjaan/PST/PTN : Mahasiswa/ UII
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/ Kota Di Wilayah Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur)"
 Tujuan/bidang : Mencari data, Wawancara, Tesis / Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Johan Arifin, S.E., PH.D., CFRA
 Peserta : -
 Waktu : 6 Bulan
 Lokasi : Bupati/ Walikota Terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TIMUR



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Program Studi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
Nomor: : 070/ 3780 /209.4/ 2022
Tanggal : 19 April 2022

1. Walikota Pasuruan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Walikota Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Bupati Pasuruan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Bupati Lumajang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Bupati Situbondo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Bupati Bondowoso Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Bupati Jember Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Bupati Banyuwangi Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. PB. SUDIRMAN KEL. PATOKAN TELP/FAX (0338) 671 927
SITUBONDO 68312

Situbondo, 28 April 2022

Kepada Yth :

Sdr. 1. Perangkat Daerah Se Kab. Situbondo
di -

SITUBONDO

Nomor : 070/0129/431.406.3.2/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian/Survey/Research**

Menunjuk Surat : Ketua Program Studi Magister Akutansi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Nomor : 270/PS.II.B.3/III/2022

Tanggal : 07 Maret 2022

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RIZAL GIRI LAKSONO

Alamat/No HP : Bedahan Kulon RT 002/RW 001, Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kab. Kebumen, Jawa Tengah / 082133960340

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

a. Judul : "DETERMINAN PERSEPSI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV)".

b. Tujuan : Tujuan Akademis untuk menyelesaikan Program Studi Magister (S2) di UII

c. Bidang : Akuntansi Pemerintahan

d. Penanggung Jawab : Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFA

e. Anggota/Peserta : 1

f. Waktu : 27 April 2022 sampai dengan 27 September 2022

g. Lokasi : Seluruh SKPD se-Kab. Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Menyampaikan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO



SOPHIA FENDI, S.STP., M. Si

Kambina Utama Muda

No. 19761112 199511 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi Magister Akutansi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
2. Sdr. Yang Bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Jember
 2. Kepala Badan Perencanaan dan
 Pembangunan Daerah Kab.Jember
 di -
 JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/274/415/2022

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Kepala Bakesbangpol Prov.Jatim, Tanggal 19 April 2022, Nomor : 070/3780/209.4/2022, Perihal : Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Rizal Giri Laksono
 NIM : 19919017
 Instansi : Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
 Alamat : Jl. Condong Catur Depok Yogyakarta
 Keperluan : Melakukan Penelitian / Survey / research dengan judul : "Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten / Kota di Wilayah Pemeriksaan Subauditorial Jawa Timur)."
 Lokasi : - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
 Waktu Kegiatan : 25 Juli s/d 25 Oktober 2022

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 25-07-2022

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681214 198809 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Kepala Bakesbangpol Prov.Jatim.
 2. Dekan Fak.Bisnis dan Ekonomika UII.
 3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN 2

Kuesioner Penelitian

Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i

Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita senantiasa dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin. Saya Rizal Giri Laksono, mahasiswa Program Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, dalam rangka memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar magister Strata-2 Program Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, maka bersama dengan surat ini saya bermaksud untuk memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat berpartisipasi sebagai responden untuk tesis saya yang berjudul: **“Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV)”**.

Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat di lampiran sesuai dengan pendapat pribadi Bapak/Ibu/Sdr/i dengan cara **memberi tanda checklist (√)** pada kolom yang tersedia. Penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis, sehingga kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i akan terjaga.

Demikian surat ini saya buat, semoga jawaban yang telah Bapak/Ibu /Sdr/i berikan dapat bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur khususnya Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/i, saya ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 07 Maret 2022

Mengetahui,

Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFA

Dosen Pembimbing

Rizal Giri Laksono

Peneliti

Data Diri Responden

Petunjuk:

Isilah **titik titik** dan berilah tanda **checklist** (√) pada kotakan yang tersedia untuk mengisi **identitas** Bapak/Ibu/Saudara/i

- Nama :(boleh inisial)
- Usia : tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
- Pendidikan Terakhir : SMA/SMK DIII DIV/S1
 S2 S3 Lainnya
- Lama Bekerja : tahun
- Pemerintah Daerah : Kota Pasuruan Kabupaten Bondowoso
 Kabupaten Pasuruan Kabupaten Jember
 Kabupaten Probolinggo Kabupaten Banyuwangi
 Kota Probolinggo
 Kabupaten Lumajang
 Kabupaten Situbondo

Petunjuk Pengisian KUESIONER

Berilah tanda **checklist** (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i responden

Keterangan:**Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)****Angka 2: Tidak Setuju (TS)****Angka 3: Netral (N)****Angka 4: Setuju (S)****Angka 5: Sangat Setuju (SS).**

PERHATIAN: Saudara diperkenankan menjawab Angka 3 (Netral) hanya jika Saudara tidak tahu sama sekali terhadap pernyataan/pertanyaan yang diajukan, atau belum pernah sama sekali mengalami kondisi atau melakukan kegiatan pada pernyataan/pertanyaan yang diajukan. Terimakasih.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kualitas laporan keuangan sebagai penyajian informasi yang lengkap, transparan, dirancang supaya tidak menyesatkan kepada pengguna, dan disusun berdasarkan standar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Redjo (2018).

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Y)		STS	TS	N	S	SS
Relevan						
1	Laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.					
2	Laporan keuangan selesai secara tepat waktu.					
3	Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan masa lalu (feedback value).					
4	Laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini.					
5	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (predictive value)					
6	Laporan keuangan menyajikan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
Andal						
7	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memenuhi kebutuhan para pengguna laporan.					
8	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.					
9	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
10	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya.					
Dapat Dibandingkan						
11	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disusun dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
12	Kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan pada penyusunan laporan keuangan.					
13	Kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.					

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Y)		STS	TS	N	S	SS
Dapat Dipahami						
14	Laporan keuangan yang dibuat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.					
15	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami,					
16	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan disesuaikan istilahnya dengan batas pemahaman para pengguna sehingga mudah dipahami.					
Sumber: Sudiarianti et al. (2015) dan Nugroho (2018)						

Akuntabilitas (X₁)

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/ individu atas keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hamsinar, 2017).

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
AKUNTABILITAS (X₁)		STS	TS	N	S	SS
Integritas Keuangan						
1	Saya melakukan analisis keuangan pada setiap kegiatan/ program yang telah selesai dilaksanakan.					
2	Kejelasan sasaran anggaran harus bisa dimengerti oleh semua aparat termasuk saya dan pimpinan serta visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
Pengungkapan						
3	Pengelolaan APBD pada kantor saya disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.					
4	Pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada kantor saya telah dilakukan.					
Ketaatan terhadap Peraturan atau Undang-Undang						
5	Jaminan pengelolaan APBD bagi saya merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pengelolaan APBD.					
6	Laporan keuangan yang saya buat harus sesuai dengan standar, peraturan, dan undang-undang.					

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
AKUNTABILITAS (X₁)		STS	TS	N	S	SS
Pertanggungjawaban Horizontal						
7	Pengelolaan APBD pada kantor saya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.					
8	Saya merasa perlu untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab saya kepada masyarakat.					
Pertanggungjawaban Vertikal						
9	Pengelolaan APBD pada kantor saya dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi.					
10	Saya membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.					
Sumber: Asroel et al. (2016) dan Hamsinar (2017)						

Komitmen Organisasi (X₂)

Komitmen organisasi menurut Wibowo (2017) berkaitan dengan sejauh mana dan bagaimana keterlibatan seseorang dengan organisasi di mana mereka bekerja dan tertarik untuk tinggal di dalam organisasi tersebut.

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
KOMITMEN ORGANISASI (X₂)		STS	TS	N	S	SS
1	Saya memiliki kepercayaan yang kuat dan menerima nilai-nilai organisasi pada tempat saya bekerja.					
2	Saya menerima tujuan dari organisasi di mana saya bekerja.					
3	Saya memiliki kemauan yang kuat untuk berusaha atau bekerja keras untuk organisasi tempat saya bekerja.					
4	Saya memiliki keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi di mana saya bekerja.					
5	Saya memiliki keinginan untuk membangun budaya etis dan menerapkannya pada tempat saya bekerja.					
Sumber: Maksyur (2015) dan Putra (2016)						

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X₃)

Kompetensi sumber daya manusia menurut Ihsanti (2014) adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi dan/ atau kewenangan dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
KOMPETENSI SDM (X ₃)		STS	TS	N	S	SS
Pengetahuan (Knowledge)						
1	Saya memahami PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik.					
2	Saya sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meningkatkan pengetahuan saya dibidang akuntansi.					
Keahlian (Skill)						
3	Saya mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.					
4	Saya selalu mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan.					
Perilaku (Attitude)						
5	Saya selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan.					
6	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan.					
Sumber: Sudiarianti et al. (2015) dan Nugroho (2018)						

Tekanan Eksternal (X₄)

Tekanan eksternal menurut Syahril et al. (2018) yaitu suatu organisasi terdapat peraturan pemerintah dan undang – undang yang berlaku sehingga jika tidak mematuhi peraturan tersebut menyebabkan suatu hal terjadi, harus ada strategi atau jalan keluar untuk menghadapi kejadian tersebut.

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
TEKANAN EKSTERNAL (X ₄)		STS	TS	N	S	SS
1	Saya merasa adanya perubahan Undang-Undang dan peraturan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD yang dihasilkan.					
2	Gubernur/ Bupati/ Walikota menuntut agar pelaporan keuangan di SKPD saya dapat berjalan baik dan hasilnya memuaskan.					
3	Meningkatnya kritik dari masyarakat atas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di SKPD saya.					
4	Seringnya pemberitaan media massa atas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di SKPD saya.					
5	Perhatian lebih dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD saya					
Sumber: Putra (2016) dan Merantika dan Heriyanto (2017)						

Transparansi (X₅)

Transparansi menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan.

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
TRANSPARANSI (X ₅)		STS	TS	N	S	SS
1	SKPD saya telah menyampaikan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SKPD dalam laporan keuangan.					
2	SKPD saya telah menyampaikan informasi mengenai ketidakberhasilan pencapaian SKPD dalam laporan keuangan.					
3	SKPD saya telah menyediakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.					
4	SKPD saya telah menyediakan informasi keuangan mengenai input, output, dan outcome secara terbuka.					
5	SKPD saya telah menyediakan akses kepada pemangku kepentingan atas laporan keuangan					
6	SKPD saya telah mengakomodasi suara/ usulan dari masyarakat melalui berbagai media.					
7	Sistem pemberian informasi kepada publik telah tersedia di SKPD saya.					
Sumber: Putra (2016) dan Riyanti (2017)						

SUDAHKAH SAUDARA MENJAWAB SETIAP NOMOR PERTANYAAN?

MOHON DIPERIKSA KEMBALI JAWABAN SAUDARA

JANGAN SAMPAI ADA YANG TERLEWATKAN / TIDAK DIISI

----- TERIMAKASIH ---

LAMPIRAN 3

Tabulasi Data

No.	Usia Responden (dalam tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Kabupaten / Kota	Lama Bekerja (dalam tahun)
1	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	1-3
2	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	>10
3	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	>10
4	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	4-6
5	>40	P	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	>10
6	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	4-6
7	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	4-6
8	>40	P	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	>10
9	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	7-10
10	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	7-10
11	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	4-6
12	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	4-6
13	>40	P	S2	Kabupaten Banyuwangi	>10
14	>40	L	S2	Kabupaten Banyuwangi	>10
15	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	4-6
16	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	1-3
17	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	1-3
18	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Banyuwangi	1-3
19	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	1-3
20	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	1-3
21	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	>10
22	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	1-3
23	26-30	P	DIII	Kabupaten Bondowoso	1-3
24	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	4-6
25	36-40	L	S2	Kabupaten Bondowoso	>10
26	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	1-3
27	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	1-3
28	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	1-3
29	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	1-3
30	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	1-3
31	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	4-6
32	36-40	P	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	7-10
33	36-40	P	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	7-10
34	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	1-3
35	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	7-10
36	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	>10
37	>40	L	S2	Kabupaten Bondowoso	>10

No.	Usia Responden (dalam tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Kabupaten / Kota	Lama Bekerja (dalam tahun)
38	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	>10
39	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Bondowoso	>10
40	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Jember	1-3
41	36-40	P	DIV/S1	Kabupaten Jember	>10
42	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	1-3
43	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	7-10
44	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	7-10
45	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	>10
46	>40	L	S2	Kabupaten Jember	>10
47	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	4-6
48	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	4-6
49	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	4-6
50	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	>10
51	>40	L	S2	Kabupaten Jember	>10
52	>40	P	DIV/S1	Kabupaten Jember	>10
53	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	7-10
54	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	7-10
55	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	>10
56	>40	L	S2	Kabupaten Jember	>10
57	>40	P	DIV/S1	Kabupaten Jember	>10
58	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	>10
59	31-35	L	S2	Kabupaten Jember	4-6
60	>40	L	S2	Kabupaten Jember	>10
61	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Jember	>10
62	>40	P	S2	Kabupaten Jember	>10
63	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	4-6
64	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	4-6
65	36-40	P	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	>10
66	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	1-3
67	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	4-6
68	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	>10
69	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	4-6
70	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	4-6
71	>40	P	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	>10
72	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	7-10
73	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	7-10
74	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	4-6
75	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	4-6
76	>40	L	S2	Kabupaten Lumajang	>10
77	>40	L	S2	Kabupaten Lumajang	>10
78	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	4-6

No.	Usia Responden (dalam tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Kabupaten / Kota	Lama Bekerja (dalam tahun)
79	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	1-3
80	36-40	P	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	7-10
81	36-40	P	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	7-10
82	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Lumajang	>10
83	>40	L	S2	Kabupaten Lumajang	>10
84	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	1-3
85	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	1-3
86	26-30	P	DIII	Kabupaten Pasuruan	1-3
87	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	4-6
88	36-40	P	S2	Kabupaten Pasuruan	7-10
89	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	>10
90	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	>10
91	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	1-3
92	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	1-3
93	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	1-3
94	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	4-6
95	36-40	P	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	4-6
96	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	>10
97	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	1-3
98	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	4-6
99	>40	P	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	>10
100	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	4-6
101	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	4-6
102	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Pasuruan	>10
103	26-30	L	DIII	Kabupaten Probolinggo	1-3
104	26-30	L	DIII	Kabupaten Probolinggo	1-3
105	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	4-6
106	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	4-6
107	>40	P	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	>10
108	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	7-10
109	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	7-10
110	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	4-6
111	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	4-6
112	>40	P	S2	Kabupaten Probolinggo	>10
113	>40	P	S2	Kabupaten Probolinggo	>10
114	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	4-6
115	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	1-3
116	36-40	P	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	7-10
117	36-40	P	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	7-10
118	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	>10
119	>40	L	S2	Kabupaten Probolinggo	>10

No.	Usia Responden (dalam tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Kabupaten / Kota	Lama Bekerja (dalam tahun)
120	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Probolinggo	4-6
121	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	1-3
122	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	4-6
123	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	4-6
124	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	1-3
125	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	4-6
126	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	7-10
127	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	1-3
128	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	1-3
129	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	1-3
130	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	4-6
131	36-40	P	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	7-10
132	>40	L	S2	Kabupaten Situbondo	>10
133	>40	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	>10
134	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	1-3
135	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	1-3
136	26-30	P	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	1-3
137	31-35	P	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	4-6
138	36-40	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	4-6
139	36-40	P	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	>10
140	26-30	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	1-3
141	31-35	L	DIV/S1	Kabupaten Situbondo	4-6
142	>40	P	S2	Kabupaten Situbondo	>10
143	26-30	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	1-3
144	26-30	P	DIV/S1	Kota Pasuruan	1-3
145	26-30	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	1-3
146	26-30	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	1-3
147	31-35	P	DIV/S1	Kota Pasuruan	1-3
148	31-35	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	1-3
149	31-35	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	1-3
150	31-35	P	DIV/S1	Kota Pasuruan	1-3
151	36-40	P	DIV/S1	Kota Pasuruan	7-10
152	36-40	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	4-6
153	26-30	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	1-3
154	36-40	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	7-10
155	>40	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	>10
156	>40	L	S2	Kota Pasuruan	>10
157	>40	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	>10
158	>40	P	DIV/S1	Kota Pasuruan	>10
159	>40	P	S2	Kota Pasuruan	>10
160	>40	P	DIV/S1	Kota Pasuruan	>10

No.	Usia Responden (dalam tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Kabupaten / Kota	Lama Bekerja (dalam tahun)
161	>40	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	>10
162	>40	P	S2	Kota Pasuruan	>10
163	36-40	L	DIV/S1	Kota Pasuruan	>10
164	31-35	L	DIV/S1	Kota Probolinggo	4-6
165	36-40	L	S2	Kota Probolinggo	7-10
166	26-30	P	DIV/S1	Kota Probolinggo	1-3
167	26-30	L	DIII	Kota Probolinggo	1-3
168	31-35	L	DIV/S1	Kota Probolinggo	1-3
169	36-40	P	S2	Kota Probolinggo	>10
170	>40	P	DIV/S1	Kota Probolinggo	>10
171	>40	L	DIV/S1	Kota Probolinggo	>10
172	26-30	L	DIV/S1	Kota Probolinggo	1-3
173	26-30	L	DIV/S1	Kota Probolinggo	1-3
174	26-30	P	DIV/S1	Kota Probolinggo	1-3
175	31-35	P	DIV/S1	Kota Probolinggo	4-6
176	36-40	L	DIV/S1	Kota Probolinggo	7-10
177	36-40	P	DIV/S1	Kota Probolinggo	7-10
178	26-30	L	DIV/S1	Kota Probolinggo	1-3
179	31-35	P	DIV/S1	Kota Probolinggo	1-3
180	31-35	L	DIV/S1	Kota Probolinggo	4-6
181	36-40	L	S2	Kota Probolinggo	>10
182	36-40	P	DIV/S1	Kota Probolinggo	7-10
183	26-30	L	DIV/S1	Kota Probolinggo	1-3
184	36-40	L	DIV/S1	Kota Probolinggo	7-10
185	>40	L	DIV/S1	Kota Probolinggo	>10
186	>40	L	S2	Kota Probolinggo	>10

No.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)																Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	3	3	3	3	3	5	5	4	5	4	4	4	2	4	3	3	58	3,63
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	5,00
3	4	4	4	5	5	4	5	4	3	3	4	4	3	4	4	4	64	4,00
4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	68	4,25
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	78	4,88
6	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	69	4,31
7	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	1	3	61	3,81
8	5	4	4	2	5	4	5	4	4	5	2	5	5	1	1	3	59	3,69
9	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	59	3,69
10	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	76	4,75
11	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	5	5	5	4	5	75	4,69
12	4	4	5	5	5	3	4	2	4	3	3	4	5	5	2	4	62	3,88
13	4	3	3	3	4	3	3	5	5	5	5	3	5	5	5	4	65	4,06
14	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	70	4,38
15	5	5	4	3	4	5	4	3	5	4	3	5	5	3	4	4	66	4,13
16	3	3	3	3	3	5	5	4	3	4	4	4	2	4	4	3	57	3,56
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	5,00
18	4	4	4	5	5	4	5	4	3	3	4	4	3	4	4	4	64	4,00
19	2	2	1	1	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	5	48	3,00
20	5	5	4	4	4	2	4	3	2	4	4	3	4	4	4	5	61	3,81
21	2	4	2	2	4	4	1	4	4	5	3	2	5	5	5	5	57	3,56
22	3	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	66	4,13
23	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	3	3	4	4	4	59	3,69
24	4	4	2	2	4	4	4	4	4	5	5	1	2	5	4	4	58	3,63
25	4	4	4	3	4	4	2	4	3	4	5	4	5	4	5	4	63	3,94
26	3	4	4	3	4	4	4	4	3	2	2	3	3	4	3	4	54	3,38
27	3	3	2	3	2	3	2	3	3	4	4	2	4	4	4	5	51	3,19
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	55	3,44
29	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	5	5	5	4	4	65	4,06
30	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	4	4	3	4	4	4	70	4,38
31	2	3	4	2	4	4	3	4	3	4	5	5	4	4	5	4	60	3,75
32	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	69	4,31
33	4	5	5	4	1	2	3	2	2	5	5	4	4	5	4	5	60	3,75
34	4	4	5	4	4	3	3	4	4	3	3	5	2	3	2	4	57	3,56
35	5	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	3	4	4	4	4	63	3,94
36	4	3	4	4	4	4	2	4	2	4	4	3	4	4	4	4	58	3,63
37	5	5	5	5	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	65	4,06
38	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	5	5	70	4,38
39	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	61	3,81
40	3	3	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	61	3,81
41	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4	5	4	67	4,19

No.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)																Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
42	4	4	4	3	5	5	5	5	4	3	5	4	3	4	3	4	65	4,06
43	4	4	4	4	5	3	5	5	5	4	4	4	4	3	5	3	66	4,13
44	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	67	4,19
45	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66	4,13
46	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	70	4,38
47	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	2	3	3	62	3,88
48	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,94
49	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	67	4,19
50	5	4	3	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	70	4,38
51	5	5	4	4	4	4	4	3	5	3	5	5	5	5	3	4	68	4,25
52	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	5	4	5	4	3	58	3,63
53	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4	5	4	67	4,19
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	62	3,88
55	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	4,06
56	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	70	4,38
57	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	69	4,31
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	5,00
59	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	65	4,06
60	3	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	60	3,75
61	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	78	4,88
62	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	3	3	5	5	5	68	4,25
63	4	4	4	3	4	4	1	4	3	3	3	3	4	4	3	4	55	3,44
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	56	3,50
65	3	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	5	3	5	63	3,94
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4,00
67	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	4,06
68	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	5	3	5	5	5	5	65	4,06
69	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	5	59	3,69
70	5	4	5	5	4	4	4	4	2	4	4	4	5	4	4	4	66	4,13
71	4	5	5	4	4	2	2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	66	4,13
72	5	5	5	5	3	5	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	64	4,00
73	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	61	3,81
74	5	5	5	5	4	4	5	3	4	4	4	2	4	4	4	4	66	4,13
75	3	4	5	5	4	4	2	4	4	4	5	3	4	3	3	5	62	3,88
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	68	4,25
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	60	3,75
78	4	4	4	4	5	3	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	62	3,88
79	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	68	4,25
80	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	63	3,94
81	5	5	3	2	1	1	3	1	1	3	3	1	4	5	4	4	46	2,88
82	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	1	2	4	4	5	61	3,81

No.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)																Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
83	3	5	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	56	3,50
84	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	61	3,81
85	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46	2,88
86	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	59	3,69
87	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	65	4,06
88	4	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	56	3,50
89	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	47	2,94
90	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	54	3,38
91	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	58	3,63
92	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	72	4,50
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	68	4,25
94	4	5	5	5	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	4	5	67	4,19
95	5	5	4	4	4	5	5	5	5	2	2	3	4	4	4	4	65	4,06
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	5	5	5	4	5	64	4,00
97	4	4	4	4	2	3	2	4	2	4	4	3	5	4	4	4	57	3,56
98	4	3	4	4	3	4	3	4	2	5	4	5	4	5	4	5	63	3,94
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	4	5	5	5	66	4,13
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4	66	4,13
101	4	4	4	4	3	3	2	4	3	4	4	3	5	4	3	3	57	3,56
102	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	1	1	4	4	5	51	3,19
103	5	4	4	5	4	4	5	3	5	4	3	4	3	5	3	4	65	4,06
104	5	4	4	5	4	4	5	3	5	4	3	4	4	5	3	4	66	4,13
105	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	3	4	5	68	4,25
106	4	3	3	4	5	5	4	5	3	4	5	4	4	4	4	5	66	4,13
107	4	4	3	3	5	4	3	4	4	5	5	4	3	3	4	5	63	3,94
108	4	3	3	4	5	4	4	5	3	2	5	5	4	3	4	5	63	3,94
109	3	4	4	4	5	5	4	3	4	4	5	5	3	4	3	5	65	4,06
110	4	3	3	3	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	3	4	57	3,56
111	5	4	4	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	5	5	5	69	4,31
112	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	70	4,38
113	5	3	3	3	5	5	5	3	3	3	5	3	5	5	5	5	66	4,13
114	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	54	3,38
115	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	73	4,56
116	2	3	2	2	3	3	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4	51	3,19
117	3	3	3	3	1	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	58	3,63
118	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	60	3,75
119	4	4	4	4	2	3	2	3	3	4	4	3	4	5	4	4	57	3,56
120	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	59	3,69
121	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	4,06
122	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	69	4,31
123	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	70	4,38

No.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)																Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
165	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	78	4,88
166	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	5	3	2	4	5	4	64	4,00
167	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	3	4	5	68	4,25
168	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	2	5	2	2	65	4,06
169	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	3	5	66	4,13
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4,00
171	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	73	4,56
172	4	4	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71	4,44
173	4	4	4	4	4	5	4	2	3	4	3	4	4	4	4	5	62	3,88
174	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	2	63	3,94
175	4	3	5	3	5	4	5	3	4	5	5	5	3	3	3	3	63	3,94
176	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	62	3,88
177	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	3	5	5	5	5	3	65	4,06
178	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	71	4,44
179	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	4,25
180	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	5,00
181	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	78	4,88
182	3	4	4	3	5	4	4	3	4	5	4	5	4	3	4	5	64	4,00
183	5	4	4	4	4	3	4	3	3	4	5	4	4	4	5	5	65	4,06
184	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	3	4	5	4	5	4	64	4,00
185	4	4	3	4	5	3	4	3	5	5	4	3	3	4	4	4	62	3,88
186	4	5	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	5	3	4	4	66	4,13

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

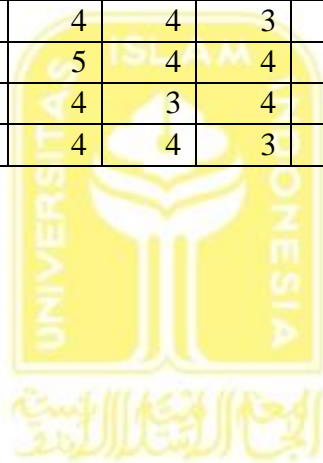
No.	Akuntabilitas (X ₁)										Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	34	3,40
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49	4,90
3	4	4	4	5	3	3	4	4	3	5	39	3,90
4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	4	39	3,90
5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	47	4,70
6	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	47	4,70
7	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	35	3,50
8	5	4	4	2	4	2	4	2	3	4	34	3,40
9	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	36	3,60
10	4	5	4	5	5	5	4	3	3	3	41	4,10
11	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47	4,70
12	4	4	5	5	3	3	3	4	3	5	39	3,90
13	4	3	3	3	4	3	2	3	2	4	31	3,10
14	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	38	3,80
15	5	5	4	3	5	5	4	1	3	1	36	3,60
16	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	34	3,40
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49	4,90
18	4	4	4	5	3	3	4	4	3	5	39	3,90
19	2	2	1	1	3	5	5	3	4	3	29	2,90
20	5	5	4	4	5	4	5	3	3	2	40	4,00
21	2	4	2	2	3	3	4	3	4	4	31	3,10
22	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	40	4,00
23	4	4	4	3	3	3	5	4	4	3	37	3,70
24	4	4	2	2	2	3	4	3	4	4	32	3,20
25	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	36	3,60
26	3	4	4	3	4	4	2	4	3	3	34	3,40
27	3	3	2	3	3	3	4	3	4	4	32	3,20
28	3	3	3	3	5	4	4	2	4	2	33	3,30
29	5	4	4	4	4	4	2	2	4	4	37	3,70
30	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	48	4,80
31	2	3	4	2	5	5	5	5	5	5	41	4,10
32	4	5	4	5	4	4	5	5	3	3	42	4,20
33	4	5	5	4	4	3	3	3	4	3	38	3,80
34	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	40	4,00
35	5	4	4	4	5	5	4	3	5	5	44	4,40
36	4	3	4	4	4	3	4	2	4	4	36	3,60
37	5	5	5	5	5	5	3	3	2	4	42	4,20
38	5	5	5	4	5	5	4	3	4	4	44	4,40
39	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39	3,90
40	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	31	3,10
41	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	43	4,30
42	4	4	4	3	4	2	3	4	3	1	32	3,20

No.	Akuntabilitas (X ₁)										Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
43	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	37	3,70
44	4	5	4	4	5	3	4	4	4	4	41	4,10
45	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	43	4,30
46	5	5	4	4	4	3	5	4	4	4	42	4,20
47	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39	3,90
48	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	37	3,70
49	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39	3,90
50	5	4	3	5	4	3	4	3	4	2	37	3,70
51	5	5	4	4	4	4	3	2	3	4	38	3,80
52	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	31	3,10
53	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	43	4,30
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
56	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	44	4,40
57	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	44	4,40
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5,00
59	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	40	4,00
60	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	3,90
61	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4	44	4,40
62	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	46	4,60
63	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	37	3,70
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3,00
65	3	4	4	4	4	5	3	2	2	2	33	3,30
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
67	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41	4,10
68	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	38	3,80
69	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	36	3,60
70	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	45	4,50
71	4	5	5	4	5	5	2	4	4	2	40	4,00
72	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	44	4,40
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
74	5	5	5	5	5	5	3	3	4	5	45	4,50
75	3	4	5	5	4	4	2	4	4	4	39	3,90
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
78	4	4	4	4	4	4	3	4	3	5	39	3,90
79	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	43	4,30
80	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39	3,90
81	5	5	3	2	5	5	5	1	1	3	35	3,50
82	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	43	4,30
83	3	5	3	3	4	4	4	5	3	4	38	3,80
84	4	3	3	3	4	4	3	4	4	2	34	3,40

No.	Akuntabilitas (X ₁)										Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
85	3	2	2	3	3	2	3	3	3	4	28	2,80
86	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31	3,10
87	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41	4,10
88	4	2	2	4	4	2	2	3	4	4	31	3,10
89	3	2	2	3	4	3	2	2	3	5	29	2,90
90	3	4	3	4	3	3	3	4	4	5	36	3,60
91	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	35	3,50
92	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	47	4,70
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	3,90
94	4	5	5	5	5	5	4	3	4	4	44	4,40
95	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	46	4,60
96	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39	3,90
97	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	38	3,80
98	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	37	3,70
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
100	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38	3,80
101	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	38	3,80
102	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	34	3,40
103	5	4	4	5	4	3	4	5	5	4	43	4,30
104	5	4	4	5	4	3	4	5	5	4	43	4,30
105	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	40	4,00
106	4	3	3	4	5	4	4	5	4	4	40	4,00
107	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	36	3,60
108	4	3	3	4	4	4	4	3	5	4	38	3,80
109	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	39	3,90
110	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	35	3,50
111	5	4	4	5	5	3	2	5	5	5	43	4,30
112	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	43	4,30
113	5	3	3	3	5	3	3	4	4	4	37	3,70
114	3	2	2	2	2	1	1	3	5	5	26	2,60
115	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	45	4,50
116	2	3	2	2	4	2	2	3	3	4	27	2,70
117	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	37	3,70
118	4	4	3	4	4	4	3	3	3	5	37	3,70
119	4	4	4	4	4	2	2	2	3	4	33	3,30
120	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	38	3,80
121	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	44	4,40
122	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	42	4,20
123	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	45	4,50
124	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	44	4,40
125	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	42	4,20
126	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	45	4,50

No.	Akuntabilitas (X ₁)										Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
127	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	36	3,60
128	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	36	3,60
129	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	34	3,40
130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31	3,10
131	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	37	3,70
132	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	37	3,70
133	4	3	3	4	4	3	4	4	5	4	38	3,80
134	4	2	4	4	4	4	4	5	3	2	36	3,60
135	4	3	3	4	5	4	3	4	3	4	37	3,70
136	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	32	3,20
137	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33	3,30
138	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	44	4,40
139	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	45	4,50
140	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	37	3,70
141	4	5	5	4	4	3	4	3	4	5	41	4,10
142	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38	3,80
143	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5,00
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	3,90
145	5	4	4	4	4	4	2	4	3	5	39	3,90
146	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5,00
147	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	39	3,90
148	5	4	4	4	4	4	2	4	3	5	39	3,90
149	4	3	4	4	5	5	4	3	4	5	41	4,10
150	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	29	2,90
151	3	3	3	3	3	1	1	3	3	4	27	2,70
152	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	29	2,90
153	3	3	3	3	3	2	2	3	4	4	30	3,00
154	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31	3,10
155	3	3	3	3	3	1	2	3	4	4	29	2,90
156	3	3	3	3	3	1	1	3	3	2	25	2,50
157	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	30	3,00
158	4	3	2	4	3	2	2	4	4	4	32	3,20
159	3	3	4	3	3	3	2	4	4	4	33	3,30
160	3	3	3	3	3	1	1	3	3	4	27	2,70
161	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	27	2,70
162	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28	2,80
163	3	3	3	3	4	2	2	3	3	2	28	2,80
164	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5,00
165	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48	4,80
166	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	43	4,30
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	3,90
168	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	40	4,00

No.	Akuntabilitas (X ₁)										Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
169	4	4	5	4	4	4	2	3	3	3	36	3,60
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	3,90
171	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	41	4,10
172	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	37	3,70
173	4	4	4	4	5	4	4	5	4	3	41	4,10
174	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	37	3,70
175	4	3	5	3	4	3	4	4	5	4	39	3,90
176	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	37	3,70
177	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	38	3,80
178	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	43	4,30
179	5	4	5	4	4	3	4	4	3	4	40	4,00
180	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5,00
181	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48	4,80
182	3	4	4	3	5	4	5	4	3	4	39	3,90
183	5	4	4	4	4	4	3	4	4	5	41	4,10
184	4	4	4	4	5	4	4	3	4	5	41	4,10
185	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	37	3,70
186	4	5	4	3	4	4	3	4	4	4	39	3,90



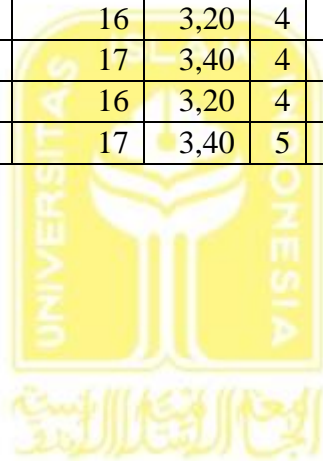
No.	Komitmen Organisasi (X ₂)					Jumlah	Rata-Rata	Kompetensi SDM (X ₃)						Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	6		
1	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	3	3	4	4	22	3,67
2	4	4	2	2	4	16	3,20	4	4	4	4	4	1	21	3,50
3	4	5	4	5	5	23	4,60	3	4	4	4	4	3	22	3,67
4	4	5	4	4	5	22	4,40	4	4	4	4	4	2	22	3,67
5	4	4	5	5	4	22	4,40	4	4	2	4	4	4	22	3,67
6	5	5	4	4	4	22	4,40	4	4	3	3	4	1	19	3,17
7	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	3	4	3	22	3,67
8	4	4	4	3	4	19	3,80	4	4	4	2	4	4	22	3,67
9	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	2	2	4	20	3,33
10	4	4	3	3	4	18	3,60	4	4	4	4	4	4	24	4,00
11	4	5	4	5	4	22	4,40	4	4	4	4	4	4	24	4,00
12	4	4	4	2	2	16	3,20	5	4	4	4	3	5	25	4,17
13	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
14	4	4	5	5	4	22	4,40	4	4	4	4	4	4	24	4,00
15	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
16	4	3	3	3	4	17	3,40	4	4	4	5	5	4	26	4,33
17	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
18	4	4	2	4	4	18	3,60	4	5	4	4	5	4	26	4,33
19	5	5	5	5	5	25	5,00	4	5	4	4	4	4	25	4,17
20	5	5	5	4	5	24	4,80	4	4	4	4	4	3	23	3,83
21	5	5	5	5	5	25	5,00	4	5	3	3	4	4	23	3,83
22	4	5	3	3	4	19	3,80	4	4	4	4	4	4	24	4,00
23	4	4	4	5	4	21	4,20	4	5	4	4	5	4	26	4,33
24	5	5	5	5	5	25	5,00	1	1	1	1	1	1	6	1,00
25	4	4	4	4	4	20	4,00	4	5	4	4	4	3	24	4,00
26	4	5	4	4	4	21	4,20	4	4	4	4	3	4	23	3,83
27	5	4	5	4	5	23	4,60	4	3	3	3	4	4	21	3,50
28	5	4	4	5	5	23	4,60	4	3	4	4	4	3	22	3,67
29	4	4	4	4	2	18	3,60	5	5	5	5	5	5	30	5,00
30	4	4	4	3	4	19	3,80	5	5	5	4	5	5	29	4,83
31	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
32	4	5	5	5	5	24	4,80	5	4	4	2	4	2	21	3,50
33	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	2	2	4	4	20	3,33
34	4	4	4	5	3	20	4,00	4	5	4	5	5	5	28	4,67
35	5	4	4	4	4	21	4,20	5	5	5	5	5	5	30	5,00
36	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	5	5	3	3	24	4,00
37	4	4	4	4	4	20	4,00	4	3	3	3	4	3	20	3,33
38	4	5	4	5	4	22	4,40	4	4	4	3	4	4	23	3,83
39	4	5	5	4	5	23	4,60	5	5	4	3	5	5	27	4,50
40	4	3	4	4	4	19	3,80	5	5	5	4	4	3	26	4,33
41	4	4	4	3	4	19	3,80	3	3	5	3	3	3	20	3,33
42	5	5	3	3	3	19	3,80	4	3	4	3	4	4	22	3,67

No.	Komitmen Organisasi (X ₂)					Jumlah	Rata-Rata	Kompetensi SDM (X ₃)						Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	6		
43	4	3	4	4	4	19	3,80	4	3	4	4	5	4	24	4,00
44	4	2	4	4	2	16	3,20	4	4	3	3	4	4	22	3,67
45	4	5	5	5	5	24	4,80	1	1	3	3	1	1	10	1,67
46	4	4	4	5	4	21	4,20	4	2	2	2	2	2	14	2,33
47	4	5	4	4	4	21	4,20	3	4	3	3	3	3	19	3,17
48	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	3	3	3	4	21	3,50
49	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	2	2	4	2	18	3,00
50	4	5	4	4	5	22	4,40	4	4	4	1	4	4	21	3,50
51	3	4	3	3	4	17	3,40	4	5	4	4	5	5	27	4,50
52	4	4	3	1	4	16	3,20	4	4	3	5	3	4	23	3,83
53	4	4	4	4	4	20	4,00	5	5	5	5	5	5	30	5,00
54	5	5	5	3	4	22	4,40	4	4	4	4	4	4	24	4,00
55	5	4	4	4	3	20	4,00	5	4	4	2	4	2	21	3,50
56	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	2	2	4	4	20	3,33
57	4	4	4	4	4	20	4,00	4	5	4	5	5	5	28	4,67
58	4	4	4	4	4	20	4,00	5	5	5	5	5	5	30	5,00
59	4	3	4	3	4	18	3,60	4	4	5	5	3	3	24	4,00
60	4	3	4	4	5	20	4,00	4	3	3	3	4	3	20	3,33
61	4	4	3	3	4	18	3,60	4	4	4	3	4	4	23	3,83
62	1	1	3	3	1	9	1,80	5	5	4	3	5	5	27	4,50
63	3	3	4	3	3	16	3,20	3	4	3	3	3	3	19	3,17
64	4	4	4	3	4	19	3,80	4	4	3	3	3	4	21	3,50
65	4	4	4	2	2	16	3,20	4	4	2	2	4	2	18	3,00
66	1	2	3	3	2	11	2,20	4	4	4	1	4	4	21	3,50
67	3	4	4	4	4	19	3,80	4	5	4	4	5	5	27	4,50
68	4	3	4	3	4	18	3,60	4	4	1	3	3	3	18	3,00
69	4	4	4	4	4	20	4,00	4	3	3	3	4	3	20	3,33
70	4	4	4	2	4	18	3,60	3	4	4	3	4	1	19	3,17
71	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
72	4	4	4	4	4	20	4,00	5	5	5	5	5	4	29	4,83
73	5	4	4	4	3	20	4,00	5	5	5	5	5	5	30	5,00
74	4	3	4	3	4	18	3,60	4	4	4	4	4	4	24	4,00
75	3	3	3	3	3	15	3,00	5	5	5	5	5	5	30	5,00
76	3	3	3	4	3	16	3,20	4	4	4	4	3	4	23	3,83
77	4	5	4	3	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
78	5	5	5	5	5	25	5,00	1	2	1	1	1	1	7	1,17
79	5	5	5	4	5	24	4,80	3	4	2	2	4	2	17	2,83
80	5	5	5	5	5	25	5,00	3	4	5	5	3	4	24	4,00
81	3	3	3	3	3	15	3,00	4	4	2	2	4	4	20	3,33
82	3	3	3	4	3	16	3,20	4	4	3	5	3	4	23	3,83
83	4	5	4	3	4	20	4,00	4	4	4	5	5	4	26	4,33
84	4	4	4	4	4	20	4,00	3	3	5	3	3	3	20	3,33

No.	Komitmen Organisasi (X ₂)					Jumlah	Rata-Rata	Kompetensi SDM (X ₃)						Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	6		
85	4	4	3	3	4	18	3,60	4	5	4	3	5	4	25	4,17
86	5	5	3	3	5	21	4,20	4	4	4	4	4	2	22	3,67
87	5	5	4	4	4	22	4,40	4	4	2	4	4	4	22	3,67
88	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	3	3	4	1	19	3,17
89	4	3	4	4	4	19	3,80	4	4	4	3	4	3	22	3,67
90	5	4	4	4	4	21	4,20	4	4	4	2	4	4	22	3,67
91	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	2	2	4	20	3,33
92	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
93	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
94	5	5	5	5	5	25	5,00	5	4	4	4	3	5	25	4,17
95	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
96	3	3	3	3	3	15	3,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
97	5	4	5	4	4	22	4,40	4	4	4	4	4	4	24	4,00
98	4	4	3	4	4	19	3,80	4	3	4	3	4	4	22	3,67
99	5	5	4	5	5	24	4,80	4	3	4	4	5	4	24	4,00
100	5	5	4	4	4	22	4,40	4	4	3	3	4	4	22	3,67
101	4	4	4	4	4	20	4,00	1	1	3	3	1	1	10	1,67
102	4	4	4	2	4	18	3,60	4	2	2	2	2	2	14	2,33
103	5	5	5	4	5	24	4,80	5	5	4	5	5	5	29	4,83
104	4	4	4	1	4	17	3,40	4	5	4	4	4	4	25	4,17
105	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
106	3	3	3	3	4	16	3,20	4	4	4	3	4	4	23	3,83
107	3	4	3	3	5	18	3,60	4	3	4	4	4	3	22	3,67
108	4	4	3	3	3	17	3,40	5	4	4	4	4	4	25	4,17
109	4	3	2	3	2	14	2,80	5	5	5	4	4	3	26	4,33
110	4	4	3	2	4	17	3,40	4	4	3	3	4	4	22	3,67
111	4	5	3	3	3	18	3,60	5	5	4	5	5	5	29	4,83
112	4	4	4	4	4	20	4,00	5	5	5	5	5	5	30	5,00
113	2	4	3	3	4	16	3,20	4	4	3	4	4	4	23	3,83
114	4	5	4	4	4	21	4,20	4	4	4	4	4	1	21	3,50
115	4	4	4	4	4	20	4,00	3	4	4	4	4	3	22	3,67
116	4	4	3	4	4	19	3,80	4	4	4	4	4	4	24	4,00
117	4	4	2	4	4	18	3,60	4	4	4	4	4	4	24	4,00
118	4	4	3	3	4	18	3,60	4	4	3	1	4	1	17	2,83
119	4	4	4	4	4	20	4,00	4	3	3	3	4	4	21	3,50
120	4	3	4	4	4	19	3,80	4	4	4	1	4	3	20	3,33
121	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
122	4	4	4	3	4	19	3,80	4	3	3	3	4	4	21	3,50
123	5	5	4	3	5	22	4,40	4	4	4	1	4	3	20	3,33
124	4	4	3	3	4	18	3,60	1	1	1	1	1	1	6	1,00
125	4	4	4	2	2	16	3,20	4	3	3	3	4	4	21	3,50
126	4	4	4	4	4	20	4,00	4	3	4	4	4	3	22	3,67

No.	Komitmen Organisasi (X ₂)					Jumlah	Rata-Rata	Kompetensi SDM (X ₃)						Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	6		
127	3	4	2	2	4	15	3,00	2	4	3	3	4	3	19	3,17
128	3	4	5	5	3	20	4,00	4	2	4	4	2	2	18	3,00
129	4	4	2	2	4	16	3,20	4	5	5	5	5	2	26	4,33
130	4	4	3	5	3	19	3,80	4	4	4	5	4	5	26	4,33
131	4	4	4	5	5	22	4,40	4	5	4	4	4	4	25	4,17
132	4	5	4	4	4	21	4,20	5	5	5	5	5	5	30	5,00
133	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	5	25	4,17
134	4	5	3	3	4	19	3,80	4	4	4	2	2	4	20	3,33
135	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
136	4	5	4	4	5	22	4,40	4	5	4	4	4	5	26	4,33
137	1	1	1	1	1	5	1,00	4	4	3	3	4	5	23	3,83
138	4	5	4	4	4	21	4,20	4	4	4	4	4	4	24	4,00
139	4	4	4	4	3	19	3,80	4	4	5	5	4	5	27	4,50
140	4	3	3	3	4	17	3,40	5	5	3	3	5	5	26	4,33
141	4	4	4	4	4	20	4,00	5	5	4	4	4	4	26	4,33
142	4	4	3	3	4	18	3,60	4	4	4	4	4	4	24	4,00
143	4	4	5	5	3	21	4,20	4	4	4	4	4	4	24	4,00
144	4	3	3	3	4	17	3,40	4	4	3	1	4	1	17	2,83
145	4	4	4	4	4	20	4,00	4	5	4	3	5	4	25	4,17
146	4	4	4	3	4	19	3,80	4	5	4	4	4	3	24	4,00
147	4	4	4	2	4	18	3,60	4	4	4	4	3	4	23	3,83
148	4	4	4	3	4	19	3,80	5	5	5	4	5	5	29	4,83
149	4	5	4	4	5	22	4,40	4	4	4	4	4	4	24	4,00
150	4	4	1	3	3	15	3,00	4	4	4	3	4	4	23	3,83
151	4	4	3	4	4	19	3,80	4	4	4	4	4	4	24	4,00
152	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	3	3	4	2	20	3,33
153	4	4	4	3	4	19	3,80	4	5	4	5	4	5	27	4,50
154	4	3	3	3	4	17	3,40	4	4	4	4	4	4	24	4,00
155	3	4	4	3	4	18	3,60	4	4	3	3	4	3	21	3,50
156	4	4	4	4	4	20	4,00	5	5	5	5	5	5	30	5,00
157	5	5	5	5	5	25	5,00	3	3	3	3	4	3	19	3,17
158	5	5	5	5	5	25	5,00	3	4	3	3	5	3	21	3,50
159	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	3	3	3	3	20	3,33
160	5	5	5	5	5	25	5,00	4	3	2	3	2	3	17	2,83
161	4	4	4	4	3	19	3,80	4	4	3	2	4	3	20	3,33
162	4	4	4	4	4	20	4,00	4	5	3	3	3	1	19	3,17
163	1	2	1	1	1	6	1,20	4	4	4	4	4	3	23	3,83
164	4	4	4	4	4	20	4,00	5	5	5	5	5	5	30	5,00
165	5	4	4	2	4	19	3,80	4	4	3	4	4	4	23	3,83
166	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	1	3	3	3	18	3,00
167	4	4	4	2	4	18	3,60	4	3	3	3	4	3	20	3,33
168	4	4	4	4	4	20	4,00	3	4	4	3	4	1	19	3,17

No.	Komitmen Organisasi (X ₂)					Jumlah	Rata-Rata	Kompetensi SDM (X ₃)						Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	6		
169	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
170	4	4	3	3	4	18	3,60	5	5	5	5	5	4	29	4,83
171	5	5	5	4	4	23	4,60	5	5	5	5	5	5	30	5,00
172	4	4	3	3	4	18	3,60	4	4	4	4	4	4	24	4,00
173	5	5	4	5	5	24	4,80	5	5	5	5	5	5	30	5,00
174	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	4	4	3	4	23	3,83
175	4	4	3	4	4	19	3,80	4	4	4	4	4	4	24	4,00
176	4	4	4	4	4	20	4,00	1	2	1	1	1	1	7	1,17
177	3	4	4	4	4	19	3,80	3	4	2	2	4	2	17	2,83
178	4	4	4	4	4	20	4,00	3	4	5	5	3	4	24	4,00
179	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	2	2	4	4	20	3,33
180	3	3	5	3	3	17	3,40	4	4	4	4	4	3	23	3,83
181	4	5	4	3	5	21	4,20	4	5	3	3	4	4	23	3,83
182	4	2	2	2	2	12	2,40	4	4	4	3	4	2	21	3,50
183	3	4	3	3	3	16	3,20	4	4	4	4	4	4	24	4,00
184	4	4	3	3	3	17	3,40	4	5	4	4	5	3	25	4,17
185	4	4	2	2	4	16	3,20	4	4	5	5	4	5	27	4,50
186	4	4	4	1	4	17	3,40	5	5	4	4	4	3	25	4,17



No.	Tekanan Eksternal (X4)					Jumlah	Rata-Rata	Transparansi (X5)							Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	6	7		
1	3	3	3	4	3	16	3,20	4	3	4	4	5	3	3	26	3,71
2	5	5	5	5	5	25	5,00	5	4	3	4	5	3	4	28	4,00
3	4	5	3	3	4	19	3,80	2	2	3	3	4	2	2	18	2,57
4	4	4	4	3	4	19	3,80	2	2	4	4	4	3	3	22	3,14
5	5	5	5	5	5	25	5,00	3	2	4	4	4	3	3	23	3,29
6	4	5	5	5	5	24	4,80	1	1	3	3	4	1	3	16	2,29
7	5	5	5	5	5	25	5,00	2	2	3	3	2	2	2	16	2,29
8	4	4	4	5	3	20	4,00	2	2	3	3	3	2	2	17	2,43
9	5	4	4	4	4	21	4,20	2	2	3	3	2	2	2	16	2,29
10	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
11	4	4	4	4	4	20	4,00	4	3	4	4	4	3	3	25	3,57
12	4	5	4	5	4	22	4,40	3	3	4	4	5	3	3	25	3,57
13	4	5	5	4	5	23	4,60	3	3	3	3	4	3	3	22	3,14
14	4	4	5	4	4	21	4,20	4	3	4	4	4	4	4	27	3,86
15	5	4	4	4	4	21	4,20	4	3	4	4	4	3	5	27	3,86
16	3	3	3	4	3	16	3,20	4	3	4	4	4	4	4	27	3,86
17	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	4	5	4	3	4	28	4,00
18	4	5	3	3	4	19	3,80	2	2	3	4	4	2	3	20	2,86
19	4	3	4	3	4	18	3,60	5	3	5	4	3	5	5	30	4,29
20	5	4	4	4	3	20	4,00	4	4	5	4	4	5	5	31	4,43
21	4	4	4	4	4	20	4,00	5	4	5	4	4	5	5	32	4,57
22	5	4	5	4	5	23	4,60	4	4	4	5	4	5	3	29	4,14
23	4	5	5	4	4	22	4,40	5	4	4	5	4	4	4	30	4,29
24	4	4	2	4	3	17	3,40	5	4	5	2	4	5	5	30	4,29
25	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
26	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	5	4	29	4,14
27	5	4	4	5	5	23	4,60	4	5	5	4	5	4	5	32	4,57
28	5	4	5	4	4	22	4,40	4	4	5	5	4	4	4	30	4,29
29	5	5	5	5	5	25	5,00	5	5	4	5	5	4	4	32	4,57
30	4	5	4	4	4	21	4,20	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
31	4	4	4	4	4	20	4,00	5	4	5	4	4	5	5	32	4,57
32	5	5	5	3	4	22	4,40	5	3	5	5	3	4	5	30	4,29
33	5	5	5	1	5	21	4,20	4	1	4	5	1	4	4	23	3,29
34	5	4	5	4	3	21	4,20	5	4	4	5	4	2	4	28	4,00
35	4	4	3	4	4	19	3,80	4	4	2	3	4	2	4	23	3,29
36	5	4	4	3	4	20	4,00	4	3	4	4	3	5	5	28	4,00
37	4	3	4	3	4	18	3,60	5	3	5	4	3	5	5	30	4,29
38	4	4	3	4	4	19	3,80	4	4	5	3	4	5	3	28	4,00
39	4	3	5	5	5	22	4,40	3	5	4	5	5	5	5	32	4,57
40	3	3	3	3	3	15	3,00	4	5	4	3	4	4	5	29	4,14
41	5	4	4	5	5	23	4,60	1	1	3	3	2	1	3	14	2,00
42	4	3	4	4	4	19	3,80	3	4	4	5	4	4	5	29	4,14

No.	Tekanan Eksternal (X ₄)					Jumlah	Rata-Rata	Transparansi (X ₅)							Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	6	7		
43	5	5	5	5	5	25	5,00	4	4	5	3	2	2	4	24	3,43
44	5	5	5	4	5	24	4,80	4	3	4	3	4	4	5	27	3,86
45	4	4	4	4	4	20	4,00	3	3	4	3	3	3	3	22	3,14
46	5	4	4	2	4	19	3,80	3	3	4	4	4	2	4	24	3,43
47	4	4	2	2	4	16	3,20	4	4	4	4	5	4	4	29	4,14
48	4	5	4	5	5	23	4,60	4	5	5	4	4	4	4	30	4,29
49	5	5	5	5	5	25	5,00	3	3	3	4	4	4	4	25	3,57
50	4	4	5	5	3	21	4,20	3	4	3	4	5	5	5	29	4,14
51	3	4	4	5	5	21	4,20	4	4	3	4	4	4	4	27	3,86
52	3	3	3	3	3	15	3,00	2	2	2	3	4	3	3	19	2,71
53	4	4	4	4	2	18	3,60	5	4	4	4	4	4	5	30	4,29
54	3	4	3	2	4	16	3,20	5	2	4	3	2	4	4	24	3,43
55	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
56	5	4	4	5	5	23	4,60	4	5	5	4	5	4	3	30	4,29
57	5	4	5	4	4	22	4,40	5	4	4	5	4	5	4	31	4,43
58	5	5	5	5	5	25	5,00	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
59	4	4	5	4	4	21	4,20	4	4	4	5	4	4	4	29	4,14
60	3	3	4	4	3	17	3,40	3	4	5	4	4	4	4	28	4,00
61	5	5	5	3	4	22	4,40	3	3	5	5	3	5	4	28	4,00
62	5	5	5	5	5	25	5,00	5	5	3	5	5	3	5	31	4,43
63	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	5	4	4	5	3	29	4,14
64	2	4	4	3	4	17	3,40	4	3	5	4	3	4	3	26	3,71
65	3	4	4	3	4	18	3,60	4	3	5	4	3	5	4	28	4,00
66	4	4	4	4	4	20	4,00	5	4	4	4	4	5	4	30	4,29
67	4	4	4	4	5	21	4,20	3	4	5	4	4	5	5	30	4,29
68	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	5	3	28	4,00
69	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
70	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
71	4	4	4	3	4	19	3,80	5	3	5	4	3	5	5	30	4,29
72	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
73	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	5	4	4	4	4	29	4,14
74	5	4	5	4	5	23	4,60	4	4	5	5	4	5	5	32	4,57
75	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	3	4	4	3	4	26	3,71
76	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	5	4	29	4,14
77	4	4	4	4	4	20	4,00	5	4	5	4	4	5	5	32	4,57
78	5	5	4	4	4	22	4,40	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
79	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
80	4	4	4	3	4	19	3,80	5	3	5	4	3	4	5	29	4,14
81	3	2	3	4	4	16	3,20	5	4	4	3	4	5	5	30	4,29
82	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	2	26	3,71
83	4	3	4	3	4	18	3,60	4	3	4	4	3	3	4	25	3,57
84	4	3	4	3	4	18	3,60	4	3	4	4	3	2	4	24	3,43

No.	Tekanan Eksternal (X ₄)					Jumlah	Rata-Rata	Transparansi (X ₅)							Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	6	7		
85	4	4	3	4	4	19	3,80	4	4	3	3	4	4	4	26	3,71
86	4	3	3	2	3	15	3,00	5	2	5	3	2	4	4	25	3,57
87	2	4	2	3	4	15	3,00	4	3	5	2	3	4	5	26	3,71
88	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	3	3	26	3,71
89	5	4	3	3	3	18	3,60	2	3	2	3	3	4	2	19	2,71
90	5	4	4	4	5	22	4,40	2	4	4	4	4	4	4	26	3,71
91	3	3	4	3	5	18	3,60	5	3	5	4	3	4	3	27	3,86
92	4	3	3	4	5	19	3,80	5	4	5	3	4	4	4	29	4,14
93	4	4	4	4	4	20	4,00	5	4	3	4	4	3	4	27	3,86
94	4	5	5	4	5	23	4,60	3	4	3	5	4	2	3	24	3,43
95	5	5	5	5	5	25	5,00	3	5	4	5	5	4	4	30	4,29
96	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	5	5	30	4,29
97	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
98	4	3	4	4	4	19	3,80	2	4	4	4	4	4	4	26	3,71
99	4	5	4	4	4	21	4,20	2	4	5	4	4	5	4	28	4,00
100	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	5	4	4	4	4	29	4,14
101	3	3	3	3	4	16	3,20	4	3	4	3	3	5	4	26	3,71
102	3	4	4	3	4	18	3,60	4	3	4	4	3	5	5	28	4,00
103	4	5	4	3	4	20	4,00	4	4	3	4	5	4	4	28	4,00
104	4	5	4	3	4	20	4,00	4	3	4	4	2	4	4	25	3,57
105	4	4	4	4	4	20	4,00	5	4	5	4	4	5	5	32	4,57
106	5	4	5	4	5	23	4,60	4	4	4	5	4	4	4	29	4,14
107	4	5	5	4	4	22	4,40	5	4	5	5	4	4	4	31	4,43
108	4	4	2	4	3	17	3,40	5	4	4	2	4	5	4	28	4,00
109	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	5	29	4,14
110	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	3	27	3,86
111	5	4	4	5	5	23	4,60	3	5	4	4	5	4	2	27	3,86
112	5	4	5	4	4	22	4,40	5	4	5	5	4	5	4	32	4,57
113	5	5	5	5	5	25	5,00	5	5	4	5	5	5	3	32	4,57
114	4	5	4	4	4	21	4,20	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
115	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	2	4	4	4	5	27	3,86
116	5	5	5	3	4	22	4,40	4	3	2	5	3	4	5	26	3,71
117	5	5	5	1	5	21	4,20	5	1	5	5	1	5	4	26	3,71
118	5	4	5	4	3	21	4,20	5	4	5	5	4	5	4	32	4,57
119	4	4	3	4	4	19	3,80	4	4	4	3	4	5	4	28	4,00
120	5	4	4	3	4	20	4,00	4	3	5	4	3	5	4	28	4,00
121	4	4	4	5	4	21	4,20	1	1	3	3	4	2	3	17	2,43
122	4	5	4	4	4	21	4,20	3	3	3	3	4	3	3	22	3,14
123	5	4	5	4	5	23	4,60	1	2	3	4	4	2	3	19	2,71
124	4	4	4	5	4	21	4,20	3	2	2	3	5	2	3	20	2,86
125	4	4	5	5	5	23	4,60	4	5	5	5	5	4	4	32	4,57
126	4	5	4	5	5	23	4,60	4	5	5	4	5	4	5	32	4,57

No.	Tekanan Eksternal (X ₄)					Jumlah	Rata-Rata	Transparansi (X ₅)							Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	6	7		
127	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
128	5	5	5	3	4	22	4,40	4	3	4	5	3	5	4	28	4,00
129	5	5	5	1	5	21	4,20	4	1	5	5	1	4	5	25	3,57
130	5	4	5	4	3	21	4,20	4	4	5	5	4	4	4	30	4,29
131	4	4	3	4	4	19	3,80	5	4	4	3	4	4	4	28	4,00
132	5	4	4	3	4	20	4,00	4	3	4	4	3	4	4	26	3,71
133	4	3	4	3	4	18	3,60	5	3	5	4	3	5	5	30	4,29
134	4	4	3	4	4	19	3,80	5	4	5	3	4	4	5	30	4,29
135	5	3	4	4	3	19	3,80	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
136	5	5	5	5	5	25	5,00	4	5	4	5	5	2	3	28	4,00
137	5	5	5	5	5	25	5,00	4	5	3	5	5	4	2	28	4,00
138	5	5	5	5	5	25	5,00	5	5	5	5	5	5	4	34	4,86
139	4	4	4	3	3	18	3,60	5	3	5	4	3	5	4	29	4,14
140	4	5	4	4	4	21	4,20	5	4	5	4	4	5	4	31	4,43
141	5	5	5	5	5	25	5,00	4	5	5	5	5	3	5	32	4,57
142	5	4	4	4	3	20	4,00	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
143	5	5	5	5	5	25	5,00	1	1	4	4	4	1	3	18	2,57
144	4	4	4	4	4	20	4,00	2	2	3	4	4	2	2	19	2,71
145	4	4	4	4	2	18	3,60	3	4	3	3	2	4	3	22	3,14
146	5	5	5	5	5	25	5,00	3	3	4	4	5	3	4	26	3,71
147	2	4	4	4	2	16	3,20	3	4	3	4	4	3	4	25	3,57
148	5	5	5	5	5	25	5,00	5	5	4	5	5	4	4	32	4,57
149	5	5	5	5	5	25	5,00	4	5	3	5	5	3	4	29	4,14
150	3	3	4	4	3	17	3,40	4	4	4	4	4	5	4	29	4,14
151	4	5	4	5	4	22	4,40	5	5	5	4	5	5	5	34	4,86
152	5	5	5	5	5	25	5,00	4	5	4	5	5	4	4	31	4,43
153	5	4	4	4	3	20	4,00	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
154	4	4	4	4	4	20	4,00	5	4	5	4	4	4	5	31	4,43
155	5	4	5	4	5	23	4,60	5	4	4	5	4	5	5	32	4,57
156	4	5	5	4	4	22	4,40	4	4	4	5	4	4	2	27	3,86
157	4	4	2	4	3	17	3,40	4	4	4	2	4	3	4	25	3,57
158	4	4	4	4	4	20	4,00	5	4	5	4	4	5	5	32	4,57
159	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	5	4	4	5	5	31	4,43
160	5	4	4	5	5	23	4,60	5	5	5	4	5	5	5	34	4,86
161	5	4	5	4	4	22	4,40	4	4	4	5	4	5	3	29	4,14
162	5	5	5	5	5	25	5,00	5	5	4	5	5	4	4	32	4,57
163	4	5	4	4	4	21	4,20	5	4	5	4	4	5	5	32	4,57
164	5	5	5	5	5	25	5,00	3	4	3	4	4	4	4	26	3,71
165	5	5	5	4	5	24	4,80	4	3	4	4	4	4	4	27	3,86
166	5	2	4	4	4	19	3,80	4	3	4	4	4	5	5	29	4,14
167	3	4	4	4	4	19	3,80	4	4	5	4	4	4	4	29	4,14
168	4	4	5	4	4	21	4,20	4	3	3	4	4	4	5	27	3,86

No.	Tekanan Eksternal (X ₄)					Jumlah	Rata-Rata	Transparansi (X ₅)							Jumlah	Rata-Rata
	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	6	7		
169	5	4	4	4	2	19	3,80	4	4	3	5	4	4	5	29	4,14
170	4	4	4	4	4	20	4,00	4	3	4	4	4	5	4	28	4,00
171	4	4	4	4	4	20	4,00	3	3	4	4	4	3	4	25	3,57
172	3	3	4	4	4	18	3,60	3	2	5	5	5	2	2	24	3,43
173	4	4	5	4	4	21	4,20	5	5	5	4	4	4	4	31	4,43
174	4	4	4	4	4	20	4,00	3	3	4	4	4	3	3	24	3,43
175	5	3	4	3	4	19	3,80	1	1	3	5	5	1	2	18	2,57
176	3	3	4	4	4	18	3,60	4	4	5	4	5	4	4	30	4,29
177	4	3	4	4	4	19	3,80	2	2	3	3	4	4	3	21	3,00
178	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	5	4	4	29	4,14
179	5	4	4	3	4	20	4,00	4	3	3	3	5	3	4	25	3,57
180	5	5	5	5	5	25	5,00	2	3	3	3	4	2	3	20	2,86
181	5	5	5	4	5	24	4,80	3	3	3	3	3	4	4	23	3,29
182	3	3	3	3	4	16	3,20	5	3	5	3	3	4	4	27	3,86
183	3	4	3	4	4	18	3,60	3	4	4	3	4	5	5	28	4,00
184	4	3	4	5	5	21	4,20	4	5	4	4	5	5	4	31	4,43
185	5	5	5	5	5	25	5,00	5	5	5	5	5	4	5	34	4,86
186	5	4	5	5	5	24	4,80	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00



LAMPIRAN 4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Akuntabilitas (X_1)

		Correlations										
		X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	X _{1.6}	X _{1.7}	X _{1.8}	X _{1.9}	X _{1.10}	TOTAL
X _{1.1}	Pearson Correlation	1	,573**	,541**	,576**	,521**	,416**	,347**	,199**	,187*	,213**	,679**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,007	,011	,004	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{1.2}	Pearson Correlation	,573**	1	,713**	,530**	,550**	,532**	,465**	,229**	,186*	,145*	,742**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,002	,011	,049	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{1.3}	Pearson Correlation	,541**	,713**	1	,677**	,585**	,539**	,411**	,277**	,234**	,180*	,778**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,001	,014	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{1.4}	Pearson Correlation	,576**	,530**	,677**	1	,515**	,438**	,333**	,351**	,283**	,290**	,750**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{1.5}	Pearson Correlation	,521**	,550**	,585**	,515**	1	,641**	,460**	,221**	,228**	,111	,723**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,002	,002	,132	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{1.6}	Pearson Correlation	,416**	,532**	,539**	,438**	,641**	1	,618**	,245**	,201**	,153*	,739**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,001	,006	,037	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{1.7}	Pearson Correlation	,347**	,465**	,411**	,333**	,460**	,618**	1	,294**	,336**	,133	,685**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,071	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{1.8}	Pearson Correlation	,199**	,229**	,277**	,351**	,221**	,245**	,294**	1	,447**	,297**	,543**
	Sig. (2-tailed)	,007	,002	,000	,000	,002	,001	,000		,000	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{1.9}	Pearson Correlation	,187*	,186*	,234**	,283**	,228**	,201**	,336**	,447**	1	,377**	,520**
	Sig. (2-tailed)	,011	,011	,001	,000	,002	,006	,000	,000		,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{1.10}	Pearson Correlation	,213**	,145*	,180*	,290**	,111	,153*	,133	,297**	,377**	1	,439**
	Sig. (2-tailed)	,004	,049	,014	,000	,132	,037	,071	,000	,000		,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
TOTAL	Pearson Correlation	,679**	,742**	,778**	,750**	,723**	,739**	,685**	,543**	,520**	,439**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		n (sampel)	%
Cases	Valid	186	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	186	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,854	10

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

B. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Komitmen Organisasi (X₂)

Correlations

		X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	TOTAL
X _{2.1}	Pearson Correlation	1	,683**	,546**	,435**	,617**	,801**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186
X _{2.2}	Pearson Correlation	,683**	1	,511**	,438**	,685**	,813**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186
X _{2.3}	Pearson Correlation	,546**	,511**	1	,611**	,524**	,805**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186
X _{2.4}	Pearson Correlation	,435**	,438**	,611**	1	,473**	,766**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186
X _{2.5}	Pearson Correlation	,617**	,685**	,524**	,473**	1	,817**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186
TOTAL	Pearson Correlation	,801**	,813**	,805**	,766**	,817**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		n (sampel)	%
Cases	Valid	186	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	186	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,854	5

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

C. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kompetensi SDM (X₃)

Correlations

		X _{3.1}	X _{3.2}	X _{3.3}	X _{3.4}	X _{3.5}	X _{3.6}	TOTAL
X _{3.1}	Pearson Correlation	1	,688**	,508**	,424**	,654**	,567**	,791**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186
X _{3.2}	Pearson Correlation	,688**	1	,508**	,459**	,718**	,525**	,806**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186
X _{3.3}	Pearson Correlation	,508**	,508**	1	,644**	,490**	,458**	,770**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186
X _{3.4}	Pearson Correlation	,424**	,459**	,644**	1	,444**	,524**	,766**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186
X _{3.5}	Pearson Correlation	,654**	,718**	,490**	,444**	1	,505**	,792**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186
X _{3.6}	Pearson Correlation	,567**	,525**	,458**	,524**	,505**	1	,782**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186
TOTAL	Pearson Correlation	,791**	,806**	,770**	,766**	,792**	,782**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		n (sampel)	%
Cases	Valid	186	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	186	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,867	6

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Tekanan Eksternal (X₄)

		Correlations					
		X _{4.1}	X _{4.2}	X _{4.3}	X _{4.4}	X _{4.5}	TOTAL
X _{4.1}	Pearson Correlation	1	,441**	,568**	,226**	,391**	,725**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,002	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186
X _{4.2}	Pearson Correlation	,441**	1	,482**	,246**	,418**	,711**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,001	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186
X _{4.3}	Pearson Correlation	,568**	,482**	1	,326**	,485**	,797**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186
X _{4.4}	Pearson Correlation	,226**	,246**	,326**	1	,319**	,619**
	Sig. (2-tailed)	,002	,001	,000		,000	,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186
X _{4.5}	Pearson Correlation	,391**	,418**	,485**	,319**	1	,724**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186
TOTAL	Pearson Correlation	,725**	,711**	,797**	,619**	,724**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	n (sampel)	186	186	186	186	186	186

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		n (sampel)	%
Cases	Valid	186	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	186	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,756	5

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Transparansi (X₅)**Correlations**

	X _{5.1}	X _{5.2}	X _{5.3}	X _{5.4}	X _{5.5}	X _{5.6}	X _{5.7}	TOTAL
X _{5.1} Pearson Correlation	1	,513**	,512**	,231**	,042	,596**	,547**	,789**
X _{5.1} Sig. (2-tailed)		,000	,000	,002	,567	,000	,000	,000
X _{5.1} n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{5.2} Pearson Correlation	,513**	1	,268**	,295**	,585**	,447**	,343**	,780**
X _{5.2} Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
X _{5.2} n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{5.3} Pearson Correlation	,512**	,268**	1	,207**	-,050	,504**	,387**	,626**
X _{5.3} Sig. (2-tailed)	,000	,000		,005	,498	,000	,000	,000
X _{5.3} n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{5.4} Pearson Correlation	,231**	,295**	,207**	1	,245**	,168*	,118	,466**
X _{5.4} Sig. (2-tailed)	,002	,000	,005		,001	,022	,108	,000
X _{5.4} n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{5.5} Pearson Correlation	,042	,585**	-,050	,245**	1	-,002	,019	,393**
X _{5.5} Sig. (2-tailed)	,567	,000	,498	,001		,974	,795	,000
X _{5.5} n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{5.6} Pearson Correlation	,596**	,447**	,504**	,168*	-,002	1	,529**	,748**
X _{5.6} Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,022	,974		,000	,000
X _{5.6} n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186
X _{5.7} Pearson Correlation	,547**	,343**	,387**	,118	,019	,529**	1	,663**
X _{5.7} Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,108	,795	,000		,000
X _{5.7} n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186
TOTAL Pearson Correlation	,789**	,780**	,626**	,466**	,393**	,748**	,663**	1
TOTAL Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
TOTAL n (sampel)	186	186	186	186	186	186	186	186

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

	n (sampel)	%
Valid	186	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	186	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,770	7

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	Y1.11	Y1.12	Y1.13	Y1.14	Y1.15	Y1.16	TOTAL
Y _{1.1}	Pearson Correlation	1	,573**	,541**	,576**	,328**	,243**	,336**	,188*	,149*	,167*	,129	,163*	,206**	,231**	,175*	,140	,606**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,001	,000	,010	,043	,022	,080	,026	,005	,002	,017	,057	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.2}	Pearson Correlation	,573**	1	,713**	,530**	,253**	,132	,208**	,111	,221**	,206**	,118	,190**	,214**	,296**	,246**	,165*	,613**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,073	,004	,133	,002	,005	,109	,010	,003	,000	,001	,025	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.3}	Pearson Correlation	,541**	,713**	1	,677**	,347**	,267**	,253**	,171*	,145*	,221**	,174*	,300**	,163*	,240**	,159*	,146*	,658**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,001	,020	,048	,002	,017	,000	,026	,001	,030	,046	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.4}	Pearson Correlation	,576**	,530**	,677**	1	,365**	,325**	,327**	,242**	,215**	,178*	,219**	,191**	,100	,300**	,180*	,227**	,670**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,001	,003	,015	,003	,009	,173	,000	,014	,002	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.5}	Pearson Correlation	,328**	,253**	,347**	,365**	1	,483**	,385**	,392**	,286**	,234**	,198**	,320**	,135	-,010	,058	,209**	,599**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,001	,007	,000	,067	,896	,433	,004	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.6}	Pearson Correlation	,243**	,132	,267**	,325**	,483**	1	,433**	,477**	,330**	,156*	,248**	,359**	,007	,074	,072	,094	,562**
	Sig. (2-tailed)	,001	,073	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,033	,001	,000	,923	,315	,328	,203	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.7}	Pearson Correlation	,336**	,208**	,253**	,327**	,385**	,433**	1	,258**	,377**	,208**	,195**	,417**	,072	-,027	,073	-,027	,555**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,001	,000	,000	,000		,000	,000	,004	,008	,000	,330	,717	,321	,713	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.8}	Pearson Correlation	,188*	,111	,171*	,242**	,392**	,477**	,258**	1	,372**	,312**	,425**	,305**	,161*	-,033	,074	,144*	,552**
	Sig. (2-tailed)	,010	,133	,020	,001	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,028	,659	,314	,050	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.9}	Pearson Correlation	,149*	,221**	,145*	,215**	,286**	,330**	,377**	,372**	1	,263**	,188*	,361**	,139	,006	,101	-,059	,504**
	Sig. (2-tailed)	,043	,002	,048	,003	,000	,000	,000	,000		,000	,010	,000	,059	,938	,169	,421	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.10}	Pearson Correlation	,167*	,206**	,221**	,178*	,234**	,156*	,208**	,312**	,263**	1	,349**	,209**	,125	,046	,154*	,121	,465**
	Sig. (2-tailed)	,022	,005	,002	,015	,001	,033	,004	,000	,000		,000	,004	,088	,532	,035	,099	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186

		Y _{1.1}	Y _{1.2}	Y _{1.3}	Y _{1.4}	Y _{1.5}	Y _{1.6}	Y _{1.7}	Y _{1.8}	Y _{1.9}	Y _{1.10}	Y _{1.11}	Y _{1.12}	Y _{1.13}	Y _{1.14}	Y _{1.15}	Y _{1.16}	TOTAL
Y _{1.11}	Pearson Correlation	,129	,118	,174*	,219**	,198**	,248**	,195**	,425**	,188*	,349**	1	,247**	,048	,051	,243**	,340**	,491**
	Sig. (2-tailed)	,080	,109	,017	,003	,007	,001	,008	,000	,010	,000		,001	,511	,488	,001	,000	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.12}	Pearson Correlation	,163*	,190**	,300**	,191**	,320**	,359**	,417**	,305**	,361**	,209**	,247**	1	,353**	-,001	,059	,092	,565**
	Sig. (2-tailed)	,026	,010	,000	,009	,000	,000	,000	,000	,000	,004	,001		,000	,990	,427	,214	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.13}	Pearson Correlation	,206**	,214**	,163*	,100	,135	,007	,072	,161*	,139	,125	,048	,353**	1	,253**	,263**	,233**	,417**
	Sig. (2-tailed)	,005	,003	,026	,173	,067	,923	,330	,028	,059	,088	,511	,000		,001	,000	,001	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.14}	Pearson Correlation	,231**	,296**	,240**	,300**	-,010	,074	-,027	-,033	,006	,046	,051	-,001	,253**	1	,398**	,169*	,336**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,001	,000	,896	,315	,717	,659	,938	,532	,488	,990	,001		,000	,021	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.15}	Pearson Correlation	,175*	,246**	,159*	,180*	,058	,072	,073	,074	,101	,154*	,243**	,059	,263**	,398**	1	,325**	,416**
	Sig. (2-tailed)	,017	,001	,030	,014	,433	,328	,321	,314	,169	,035	,001	,427	,000	,000		,000	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y _{1.16}	Pearson Correlation	,140	,165*	,146*	,227**	,209**	,094	-,027	,144*	-,059	,121	,340**	,092	,233**	,169*	,325**	1	,375**
	Sig. (2-tailed)	,057	,025	,046	,002	,004	,203	,713	,050	,421	,099	,000	,214	,001	,021	,000		,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
TOTAL	Pearson Correlation	,606**	,613**	,658**	,670**	,599**	,562**	,555**	,552**	,504**	,465**	,491**	,565**	,417**	,336**	,416**	,375**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		n (sampel)	%
Cases	Valid	186	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	186	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,825	16

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

LAMPIRAN 5

Hasil Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Y
n (sampel)		186
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,9763
	Std. Deviation	,42186
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,089
	Negative	-,052
Kolmogorov-Smirnov Z		1,213
Asymp. Sig. (2-tailed)		,105

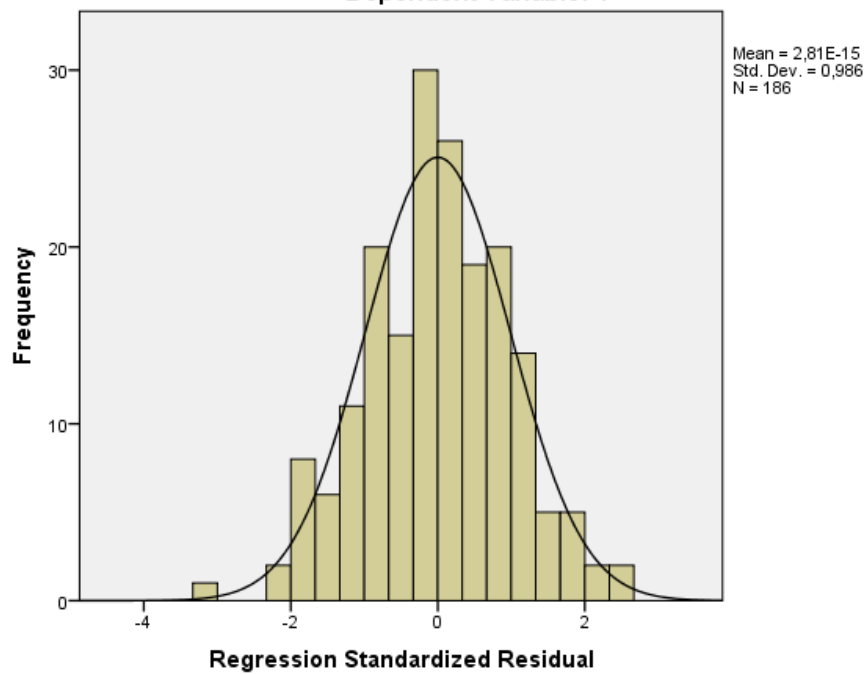
a. Test distribution is Normal.

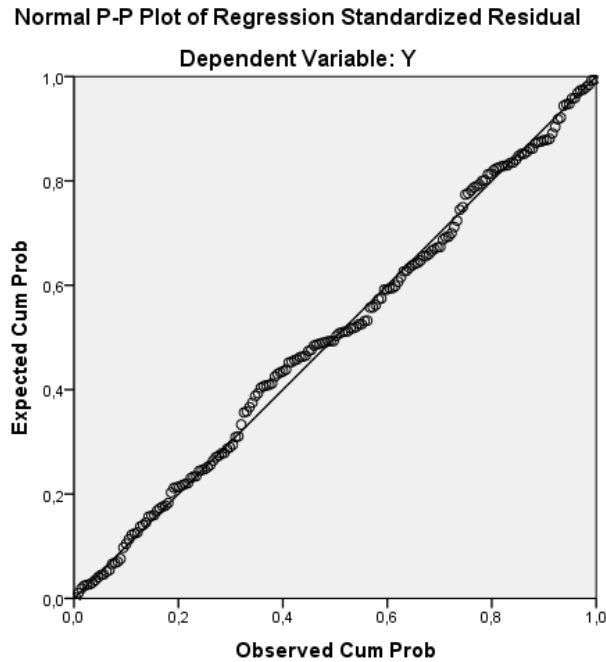
b. Calculated from data.



Histogram

Dependent Variable: Y





B. Uji Multikolinearitas



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,128	,261		4,325	,000		
X ₁	,570	,037	,735	15,461	,000	,872	1,147
X ₂	,001	,029	,001	,022	,982	,980	1,020
X ₃	,013	,027	,021	,463	,644	,930	1,075
X ₄	,141	,039	,170	3,590	,000	,878	1,139
X ₅	,008	,034	,011	,236	,813	,927	1,079

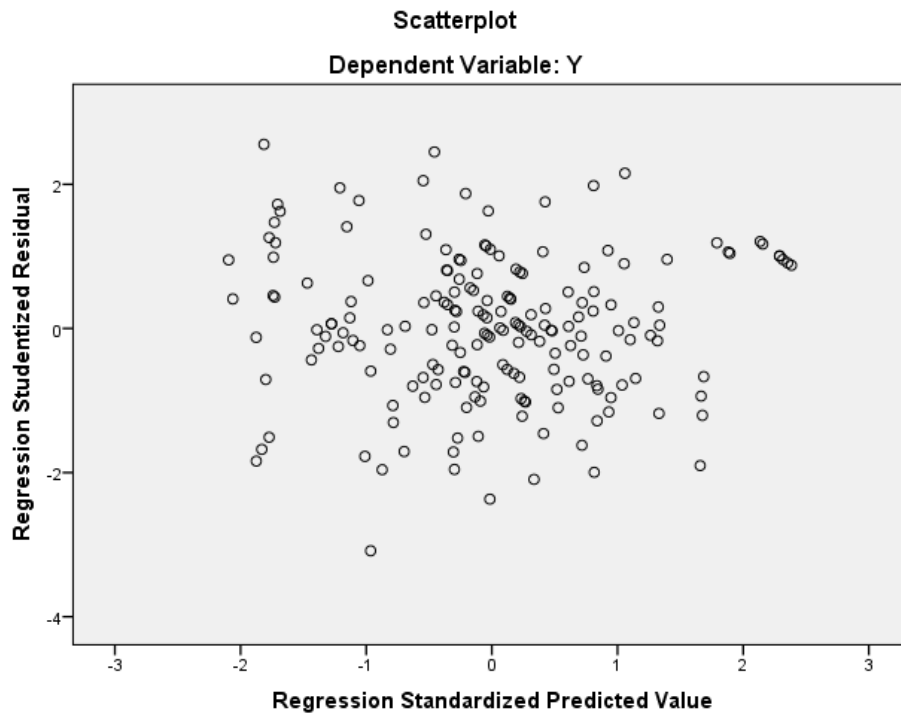
a. Dependent Variable: Y

C. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,314	,162		1,944	,053
X ₁	-,020	,023	-,068	-,854	,394
X ₂	-,006	,018	-,025	-,334	,738
X ₃	,011	,017	,049	,633	,528
X ₄	-,002	,024	-,006	-,081	,936
X ₅	-,013	,021	-,048	-,625	,533

a. Dependent Variable: ABS_RES



LAMPIRAN 6

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ₅ , X ₂ , X ₄ , X ₃ , X ₁ ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,803 ^a	,645	,635	,25481

a. Predictors: (Constant), X₅, X₂, X₄, X₃, X₁

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	21,237	5	4,247	65,417	,000 ^b
Residual	11,687	180	,065		
Total	32,924	185			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X₅, X₂, X₄, X₃, X₁

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,128	,261		4,325	,000
X ₁	,570	,037	,735	15,461	,000
X ₂	,001	,029	,001	,022	,982
X ₃	,013	,027	,021	,463	,644
X ₄	,141	,039	,170	3,590	,000
X ₅	,008	,034	,011	,236	,813

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	n (sampel)
Predicted Value	3,2665	4,7841	3,9763	,33881	186
Std. Predicted Value	-2,095	2,384	,000	1,000	186
Standard Error of Predicted Value	,022	,095	,044	,014	186
Adjusted Predicted Value	3,2483	4,7690	3,9764	,33967	186
Residual	-,76938	,63841	,00000	,25134	186
Std. Residual	-3,019	2,505	,000	,986	186
Stud. Residual	-3,085	2,554	,000	1,002	186
Deleted Residual	-,80329	,66344	-,00006	,25965	186
Stud. Deleted Residual	-3,161	2,594	,000	1,008	186
Mahal. Distance	,390	24,519	4,973	4,102	186
Cook's Distance	,000	,070	,006	,010	186
Centered Leverage Value	,002	,133	,027	,022	186

a. Dependent Variable: Y

